

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDesa) PADA PEMERINTAH DESA
ROWOTENGAH KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Arisatur Rohma
NIM : E20183094

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2022**

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDesa) PADA PEMERINTAH DESA
ROWOTENGAH KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Arisatur Rohma

NIM : E20183094

Disetujui Pembimbing



Ana Pratiwi, S.E., M.S.A.
NIP. 198809232019032003

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDesa) PADA PEMERINTAH DESA
ROWOTENGAH KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Selasa


Tanggal : 28 Juni 2022

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris


Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001


Dr. Moh Haris Balady, S.E., M.M
NUP. 201603142

Anggota:

1. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si ()

2. Ana Pratiwi, S.E., M.S.A ()

Menyetujui

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Rifa'i, S.E., M.Si

NIP. 80807 200003 1 001

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ واطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تَوْتَهُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَلْوِيْنًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa' [4]:59).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 87.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai bentuk terimakasih, penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis (Bapak Abdul Ghofur dan Ibu Iswati) terimakasih atas dukungan, kasih sayang, nasihat dan doa yang senantiasa dipanjatkan untuk mengiringi setiap langkah penulis.
2. Adik-adik tersayang (Siti Aurila Anggraeni dan Ahmad Fahri) terimakasih selalu menjadi penghibur ditengah kepenatan menyelesaikan skripsi ini.
3. Guru-guru penulis mulai dari TK hiingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmunya serta membimbing dengan penuh rasa sabar dan ketulusan.
4. Dosen pembimbing penulis Ibu Ana Pratiwi, S.E., M.S.A yang selalu membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini
5. Teman-teman yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan inspirasi sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Almamater tercinta UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu selama ini.
7. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all these hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

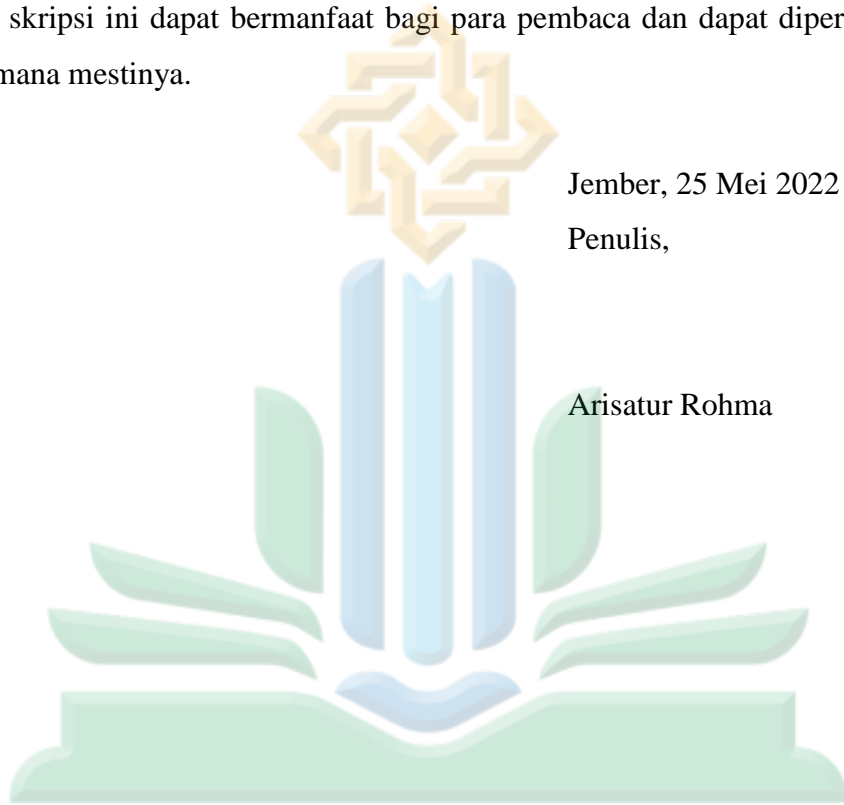
1. Bapak Prof. Dr. H.Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan serta mengembangkan kepribadian di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Daru Anondo, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Ana Pratiwi, S.E., M.S.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta tenaganya dalam membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan serta arahan selama penulis menuntut ilmu.
6. Kepala Desa Rowotengah dan segenap perangkat Desa Rowotengah yang telah memberikan kesempatan serta dukungan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, masukan, dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Mei 2022

Penulis,

Arisatur Rohma



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Arisatur Rohma, Ana Pratiwi, 2022: *Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Pemerintah Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.*

Latar belakang penelitian ini adalah adanya peningkatan alokasi dana desa yang diterima setiap desa, pelaporan yang beragam serta adanya titik kronis dalam pengelolaan keuangan desa sehingga menuntut adanya pertanggungjawaban yang besar oleh Pemerintah Desa, oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan APBDesa. Penerapan prinsip *good governance* diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Rowotengah terkait pengelolaan APBDesa.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pengaruh penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDesa di Desa Rowotengah? (2) Bagaimana pengaruh penerapan transparansi terhadap pengelolaan APBDesa di Desa Rowotengah? (3) Bagaimana pengaruh penerapan partisipasi terhadap pengelolaan APBDesa di Desa Rowotengah?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDesa di Desa Rowotengah, (2) mengetahui pengaruh penerapan transparansi terhadap pengelolaan APBDesa di Desa Rowotengah, dan (3) mengetahui pengaruh penerapan partisipasi terhadap pengelolaan APBDesa di Desa Rowotengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausalitas. Teknik pemilihan sampel menggunakan sampling jenuh berjumlah 40 orang yang meliputi Aparatur Pemerintah Desa Rowotengah, BPD dan Ketua RW. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil analisis data adalah variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi mampu menjelaskan varian variabel pengelolaan APBDesa sebesar 65,5%. Kesimpulan dari penelitian ini meliputi: (1) penerapan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah, (2) Penerapan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah, dan (3) Penerapan partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah.

Kata kunci: *good governance*, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, pengelolaan APBDesa.

ABSTRACT

Arisatur Rohma, Ana Pratiwi , 2022: The Effect Of The Implementation Of Good Governance Principle On Village Income And Expenditure Budget (APBDesa) Management in Rowotengah Village Government Sumberbaru Subdistrict Jember Regency.

The backgrounds of this research were an improvement in villages fund allocation which received by each village, multiple reporting, and chronic point in village financial management so that demand a great responsibility from village government, therefore village government must be able to implement accountability, transparency and participation principle in APBDesa management.

Problem focus of this research is: (1) Does the implementation of accountability have an effect on Rowotengah Village Governments APBDesa management? (2) Does the implementation of transparency have an effect on Rowotengah Village Governments APBDesa management? (3) Does the implementation of participation have an effect on Rowotengah Village Governments APBDesa management?

This research aimed to: (1) knowing the effect of the implementation of accountability on Rowotengah Village Governments APBDesa management, (2) knowing the effect of the implementation of transparency on Rowotengah Village Governments APBDesa management and (3) knowing the effect of the implementation of participation on Rowotengah Village Governments APBDesa management.

This research used quantitative research method with an associative causality approach. The sample selection technique used saturated sampling with 40 participants consisting of all Rowotengah Village Government Apparatus, BPD and head of RW. The data collection technique used questionnaire with likert scale. The data analysis technique used multile regression analysis.

The result was the accountability, transparency and participation variable able to explain variant of the APBDesa management variable equal to 65,5%. The conclusion of this research includes: (1) the implementation of accountability has a positive effects for Rowotengah Village Governments APBDesa management, (2) the implementation of transparency has a positive effects for Rowotengah Village Governments APBDesa management and (3) the implementation of participation has a positive effects for Rowotengah Village Governments APBDesa management.

Keywords : good governance, accountability, transparency, participation and APBdesa management.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN	9
F. DEFINISI OPERASIONAL.....	10
G. ASUMSI PENELITIAN.....	12
H. HIPOTESIS	13
I. METODE PENELITIAN	15
J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	26

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	28
A. PENELITIAN TERDAHULU	28
B. KAJIAN TEORI.....	42
1. PEMERINTAH DESA.....	42
2. <i>GOOD GOVERNANCE</i>	43
3. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)	48
BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	62
A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	62
B. PENYAJIAN DATA	66
C. ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS	69
D. PEMBAHASAN.....	86
BAB IV PENUTUP	92
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Pilihan Jawaban Kuesioner	17
1.2 Kategori Variabel	20
2.1 Penelitian Terdahulu	37
3.1 Formasi Aparatur Pemerintah Desa Rowotengah	65
3.2 Rincian Pembagian dan Pengembalian Kuesioner.....	67
3.3 Jenis Kelamin Responden	67
3.4 Usia Responden.....	68
3.5 Tingkat Pendidikan Responden.....	68
3.6 Masa Kerja Responden	69
3.7 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas	70
3.8 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi	70
3.9 Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi	71
3.10 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan APBDesa.....	72
3.11 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	72
3.12 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	73
3.13 Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas.....	74
3.14 Frekuensi Kategori Variabel Akuntabilitas.....	75
3.15 Distribusi Frekuensi Variabel Transparansi.....	76
3.16 Frekuensi Kategori Variabel Transparansi.....	76
3.17 Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi.....	77
3.18 Frekuensi Kategori Variabel Partisipasi.....	78
3.19 Distribusi Frekuensi Variabel Pengelolaan APBDesa	79
3.20 Frekuensi Kategori Variabel Pengelolaan APBDesa.....	79
3.21 Hasil Uji Normalitas	80
3.22 Hasil Uji Multikolinearitas.....	81
3.23 Hasil Uji Heteroskedastisitas	82
3.24 Hasil Uji Hipotesis	83

DAFTAR GAMBAR

1.1 Model Kerangka Berpikir	12
3.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rowotengah.....	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Indonesia di Era Reformasi saat ini membawa perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan tersebut ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹ Desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.² Sistem pemerintahan jenis ini menuntut pemerintah daerah untuk semakin mandiri dalam sektor pembangunan daerah dengan cara memberdayakan berbagai kekayaan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Oleh karena itu sistem desentralisasi ini berkembang hingga tingkat pemerintahan desa.

Tingginya tuntutan para pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pada dasarnya akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi serta pengungkapan atas kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Tuntutan

¹ Irwan Waris, "Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 3, Nomor 1, (Maret 2017): 39.

² Sekretariat Negara RI, UUD Tahun 1945, pasal 18 ayat (2)

untuk menerapkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik selain terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, juga terjadi pada pemerintahan desa. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Pemberlakuan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memperkenalkan paradigma dan konsep baru kebijakan pengelolaan desa di tingkat nasional. Undang-undang desa ini menempatkan desa sebagai wajah Indonesia bukan lagi sebagai latar belakang Indonesia. Desa bisa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan. Undang-undang tersebut menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi maju, mandiri, kuat dan demokratis sehingga dapat menciptakan pondasi yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.⁴

³ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (1).

⁴ Rustiarini, Ni Wayan. "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, (April, 2017): 4.

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan wilayah disektor pedesaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁵ Besarnya dana desa dialokasikan dengan memperhatikan beberapa hal seperti jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Adanya dana desa ini mengakibatkan jumlah pendapatan desa semakin meningkat, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban yang baik. Peningkatan alokasi dana yang diterima masing-masing desa menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektifitas, dan efisiensi pemerintah desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa selama satu tahun anggaran dimulai dari

⁵ Sekretariat Negara RI, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 1 ayat (4).

1 Januari sampai dengan 31 Desember.⁶ Keuangan desa dikemas dalam suatu wadah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa merupakan dokumen hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja desa yang ditetapkan untuk melaksanakan aktivitas pemerintah desa selama satu tahun.⁷ APBDesa merupakan instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Oleh karena itu pengelolaan APBDesa harus didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi. Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah desa, penyediaan informasi, dan kemudahan memperoleh informasi. Akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap tugas yang diberikan serta kebijakan atau keputusan yang diambil. Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi. Partisipasi yaitu kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kesamaan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Governance merupakan suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang baik. Konsep *good governance* di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁸ *Good governance* dianggap sebagai pola pikir

⁶ Sekretariat Negara RI, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 1 ayat (6).

⁷ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 27.

⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 22.

baru bagi manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai pusat perubahan dari perkembangan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah juga bisa disebut sebagai pusat pengembangan karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki. Namun terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut BAPPENAS kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan permasalahan utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.⁹ Selaku pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah tingkat desa untuk mengelola keuangan desa, masyarakat berhak mendapatkan informasi keuangan pemerintah desa. Keterbukaan informasi ini merupakan salah satu bentuk perwujudan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas pengelolaan APBDesa dapat dipengaruhi oleh aksesibilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dikatakan efektif apabila akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban dapat dibaca dan dipahami. Akses publik yang mudah saat ini yaitu melalui internet, baik melalui sebuah *blog* atau *website* tertentu yang dapat diakses dengan mudah

⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007), 14.

oleh masyarakat luas. Namun pada kenyataannya tidak semua desa memiliki *website* sendiri dan saat ini belum ada desa yang mengunggah laporannya ke *website*, mereka hanya melaporkannya kepada bupati/walikota melalui camat, kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kepada sebagian warganya melalui sebuah musyawarah desa. Hal tersebut benar-benar terjadi di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Dimana aksesibilitas pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa Rowotengah belum bisa dikatakan efektif dan maksimal. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Rowotengah tidak pernah mengunggah laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa di *website* sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan akses publik.

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Pemilihan objek ini dikarenakan pemerataan pembangunan di Desa Rowotengah cukup berkembang dibandingkan desa-desa di sekitarnya. Selain itu pemerataan pembangunan di Desa Rowotengah hampir mencapai angka 100%. Hal tersebut dikarenakan tata kelola keuangan desa di Desa Rowotengah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar prinsip *good governance* (akuntabilitas, transparansi, partisipasi) mempengaruhi pengelolaan APBDesa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah?
2. Bagaimana Pengaruh Penerapan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah?
3. Bagaimana Pengaruh Penerapan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah?
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah?

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah?

D. Manfaat Penelitian

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam memperkaya wawasan tentang pengaruh penerapan prinsip *good governance* terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa khususnya aparatur desa yang mengelola secara langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan prinsip *good governance* terhadap pengelolaan APBDesa.

- b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait pengelolaan APBDesa.

c) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan serta membuka wawasan secara mendalam mengenai pengelolaan APBDesa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam (variasi) nilai.¹⁰ Dilihat dari aspek hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi:

a. Variabel Independen

Variabel independen atau sering disebut sebagai variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)¹¹.

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini yaitu *good governance* antara lain:

- 1) Akuntabilitas (X1)
- 2) Transparansi (X2)
- 3) Partisipasi (X3)

b. Variabel Dependen

Variabel dependen atau sering disebut sebagai variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena

¹⁰ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 41.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 39.

adanya variabel bebas. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y).

2. Indikator Variabel

a. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y)

Pengelolaan APBDesa dapat diukur dengan konsep *value for money* melalui indikator-indikator berikut:

- 1) Ekonomi
- 2) Efisiensi
- 3) Efektivitas

b. *Good Governance* (X)

Pengukuran variabel *good governance* didasarkan pada prinsip-prinsip yang diungkapkan Mardiasmo yaitu:

- 1) Akuntabilitas (X1)
- 2) Transparansi (X2)
- 3) Partisipasi (X3)

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang digunakan sebagai acuan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.¹² Definisi operasional dari penelitian ini antara lain:

¹² Panitia Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 38.

1. *Good Governance*

Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹³ Penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha yakni upaya-upaya yang dilakukan pemerintah guna memberikan dukungan bagi aktivitas usaha atau ekonomi. *Legal framework* yaitu penciptaan undang-undang hukum yang menjadi aturan dalam aktivitas usaha serta *political framework* yaitu kebijakan politik yang mendorong terciptanya aktivitas usaha yang kondusif sehingga memacu tingkat perekonomian masyarakat.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksana pengelolaan keuangan desa untuk memberikan semua informasi mengenai seluruh kegiatan dan aktivitas pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.¹⁴

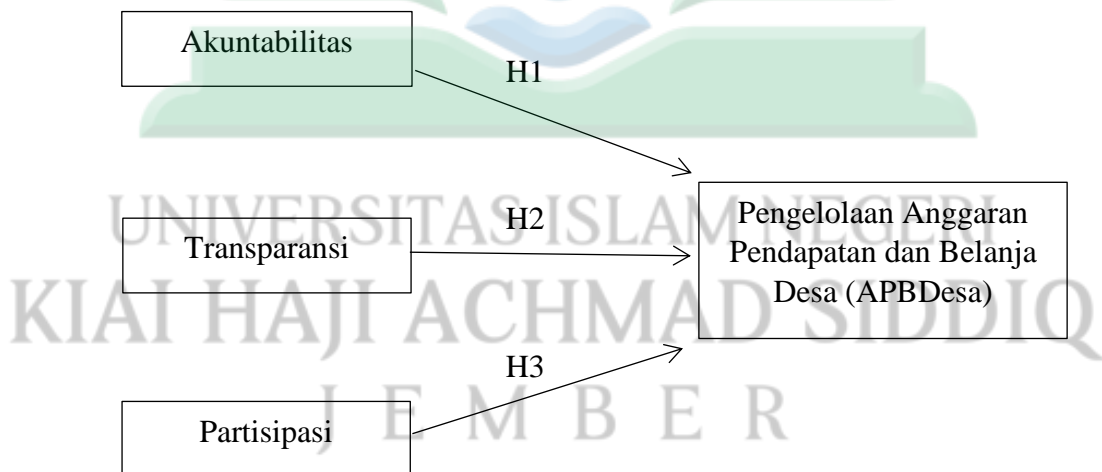
¹³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 23.

¹⁴ Kania Agustina, *Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 59.

G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian atau disebut juga anggapan dasar, merupakan sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Sebelum peneliti mengumpulkan data, anggapan dasar harus dirumuskan terlebih dahulu secara jelas. Anggapan dasar selain berfungsi sebagai dasar berpijak yang kokoh bagi masalah yang diteliti juga untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian dan merumuskan hipotesis.¹⁵ Asumsi dalam penelitian ini yaitu adanya pengaruh penerapan prinsip *good governance* (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) terhadap pengelolaan APBDesa pada Pemerintah Desa Rowotengah.

Gambar 1.1
Model Kerangka Berpikir



Sumber: data diolah

¹⁵ Panitia Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 39.

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara secara teoretis terhadap permasalahan yang dihadapi serta dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta empiris.¹⁶ Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh penerapan prinsip *good governance* terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Pemerintah Desa Rowotengah” hipotesisnya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh antara akuntabilitas dengan pengelolaan APBDesa

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan keuangan desa, prinsip akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi aparatur pemerintah desa untuk bertindak sebagai penanggungjawab atas kinerja kegiatan atau program yang sedang dilakukan. Masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun realisasi pelaksanaan anggaran, selain itu masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui anggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa merupakan bentuk perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan APBDesa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jhoin Sarjono (2021), yang menguji pengaruh *good governance* terhadap pengelolaan

¹⁶ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 52.

alokasi dana desa menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBDesa.

2. Pengaruh antara transparansi dengan pengelolaan APBDesa

Transparansi dapat diartikan bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Prinsip transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban aparatur desa terkait pengelolaan APBDesa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Farhana Puteri (2020), dengan judul “Analisis transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar” menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hipotesis berikut:

H₂ : Penerapan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBDesa.

3. Pengaruh antara partisipasi dengan pengelolaan APBDesa

Kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah ialah partisipasi masyarakat karena menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi dapat diartikan sebagai penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat. Dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa, pemerintah desa melibatkan masyarakat dengan diadakannya Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rino Pandhu Wibowo (2018) yang menguji pengaruh *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa *good governance* (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Penerapan partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBDesa

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausalitas. Metode kuantitatif yaitu suatu metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Penelitian bersifat asosiatif kausalitas dilakukan untuk menganalisis hubungan yang bersifat sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

2. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 orang yang meliputi seluruh Aparatur Pemerintah Desa Rowotengah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ketua RW (Rukun Warga).

3. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹⁸ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik sampel yang dalam penentuannya semua populasi digunakan sebagai sampel.¹⁹

¹⁷ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 66.

¹⁸ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 58.

¹⁹ Nisak Ruwah Ibnatur Husnul, Eka Rima Prasetya, Prima Sadewa dkk, *Statistik Deskriptif* (Tangerang: Unpam Press, 2020), 18.

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer dengan penyebaran angket (kuesioner) dan wawancara. Angket (kuesioner) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dengan menyertakan beberapa alternatif jawaban. Teknik ini menggunakan skala *likert*, yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Setiap jawaban dari kuesioner akan diberikan skor. Skor untuk setiap jawaban yaitu:

Tabel 1.1
Daftar Pilihan Jawaban Kuesioner

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

5. Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 22.0 (*Statistical Product and Solution*). Peneliti hendak mengetahui bagaimana pengaruh penerapan prinsip *good governance* (akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi) terhadap pengelolaan APBDesa pada Pemerintah Desa Rowotengah, maka:

a. Melakukan pengujian kualitas data pada data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Pengujian ini terdiri dari:

1) Uji Validitas

Validitas merupakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.²⁰ Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.²¹ Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Product Moment Correlation* dengan taraf signifikansi 5%. Kemudian hasil dari nilai r hitung dibandingkan dengan r tabel. Pernyataan tersebut dinyatakan valid apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu

²⁰ Widodo, *Metodologi Penelitian : Populer dan Praktis* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 90

²¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2006) 45.

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.²²

- b. Melakukan analisis statistik deskriptif pada variabel penelitian.

Statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan memberikan gambaran atau deskripsi data yang dikumpulkan dan tidak bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau general.²³ Analisis deskriptif dapat disajikan dalam bentuk skor minimum, skor maksimum, jangkauan (range), mean, median, modus, standar deviasi, varian dan sebagainya. Statistik deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi yang dilakukan dengan menghitung jangkauan atau rentang data, menentukan kelas interval, dan menentukan panjang kelas. Langkah-langkah dalam menyajikan tabel distribusi frekuensi meliputi:²⁴

- 1) Menentukan jangkauan data, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum + 1.
- 2) Menghitung jumlah kelas interval menggunakan bantuan rumus Sturges.

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

²² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2006) 41.

²³ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 106.

²⁴ Nisak Ruwah Ibnatur Husnul, Eka Rima Prasetya, Prima Sadewa dkk, *Statistik Deskriptif* (Tangerang: Unpam Press, 2020), 44-45.

- 3) Menghitung panjang kelas, yaitu jangkauan dibagi jumlah kelas.
- 4) Menyusun interval kelas, menyusun data dari terkecil hingga terbesar.
- 5) Mengelompokkan nilai variabel menjadi 5 kategori, dengan rumus:

Mean Ideal (Mi) = $\frac{1}{2}$ (nilai maksimum + nilai minimum)

Std. Deviasi Ideal (Si) = $\frac{1}{6}$ (nilai maksimum – nilai minimum)

Tabel 1.2
Kategori Variabel

Kriteria	Interval	Penyesuaian
Sangat Tinggi	$Mi + 1,5Si < X \leq Mi + 3Si$	Sangat Baik
Tinggi	$Mi + 0,5Si < X \leq Mi + 1,5Si$	Baik
Sedang	$Mi - 0,5Si < X \leq Mi + 0,5Si$	Sedang
Rendah	$Mi - 1,5Si < X \leq Mi - 0,5Si$	Buruk
Sangat Rendah	$Mi - 3Si < X \leq Mi - 1,5Si$	Sangat Buruk

Sumber: Azwar (dalam skripsi Rino Pandhu Wibowo, 2018)

- c. Melakukan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari:

- 1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.²⁵ Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan

²⁵ Imam Ghazali, *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Semarang: Yoga Pratama, 2002), 76.

menggunakan *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal, sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan tidak normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai TOL (*Tolerance*) dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Caranya dengan melihat nilai VIF, apabila nilai VIF $< 10,00$ maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dan apabila nilai VIF $> 10,00$ maka terjadi multikolinieritas.²⁶

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain.²⁷ Untuk mendeteksi ada atau

²⁶ Widodo, *Metodologi Penelitian : Populer dan Praktis* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 115.

²⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian : Populer dan Praktis* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 114.

tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode *Glejser* dan taraf signifikansi 5%. Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Selanjutnya dilakukan Uji Hipotesis menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan taraf signifikansi 5% yang terdiri dari:

1) Koefisien Korelasi (R)

Angka pada nilai R menunjukkan arah korelasi atau hubungan diantara variabel bebas (variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) terhadap variabel terikat (pengelolaan APBDesa). Angka positif menunjukkan hubungan yang searah begitupun sebaliknya.

2) Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.²⁸ Besarnya koefisien determinasi adalah 0 - 1. Semakin mendekati 0, semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen (X) terhadap nilai variabel dependen.

²⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2006), 83.

Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1, maka variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel pengelolaan APBDesa.

3) Uji-t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial.²⁹

a) Hipotesis

(1) H_0 : tidak ada pengaruh *good governance* secara parsial terhadap pengelolaan APBDesa.

(2) H_1 : ada pengaruh *good governance* secara parsial terhadap pengelolaan APBDesa.

b) Nilai Kritis

(1) Nilai kritis t didapat dari tabel distribusi dengan menggunakan tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0.05$).

(2) Derajat kebebasan : $n - 2 = n - k - 1$ dimana k adalah jumlah variabel

c) Nilai Hitung

$$t = \frac{r\sqrt{n} - 2}{\sqrt{1 - r^2}}$$

²⁹ Ghozali, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta : Erlangga, 2013), 95.

Keterangan:

r : korelasi

n : banyaknya sampel

t : tingkat signifikan (t Hitung) yang selanjutnya dibandingkan dengan t tabel.

d) Keputusan

Kriteria uji-t:

(1) Jika nilai t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak H_1 diterima, artinya signifikan (berkontribusi positif).

(2) Jika nilai t hitung $< t$ tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak signifikan (tidak berkontribusi positif).

4) Uji F (Simultan)

Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat.³⁰ Jika hasil uji simultan pada penelitian ini adalah signifikan, maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Apabila nilai F hitung \geq F tabel, maka variabel akuntabilitas, transparansi maupun partisipasi

³⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2006), 84..

memiliki pengaruh terhadap variabel pengelolaan APBDesa.

Tahapan yang dilakukan dalam Uji-F antara lain:

a) Menentukan Hipotesis

(1) H_0 : tidak ada pengaruh *good governance* secara simultan terhadap pengelolaan APBDesa.

(2) H_1 : ada pengaruh *good governance* secara simultan terhadap pengelolaan APBDesa.

b) Menentukan tingkat signifikansi (α)

Nilai yang sering digunakan untuk signifikansi adalah 5%.

c) Menentukan F hitung

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 : Koefisien koerelasi berganda

K : Jumlah variabel bebas

N : Jumlah anggota sampel

d) Menentukan F tabel

Tabel uji-F pada $\alpha = 5\%$ dengan tingkat keyakinan 95%.

e) Kriteria uji-F

(1) Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya signifikan (kontribusi positif).

- (2) Jika nilai F hitung $< F$ tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak signifikan (tidak kontribusi positif).

J. Sistematika Pembahasan

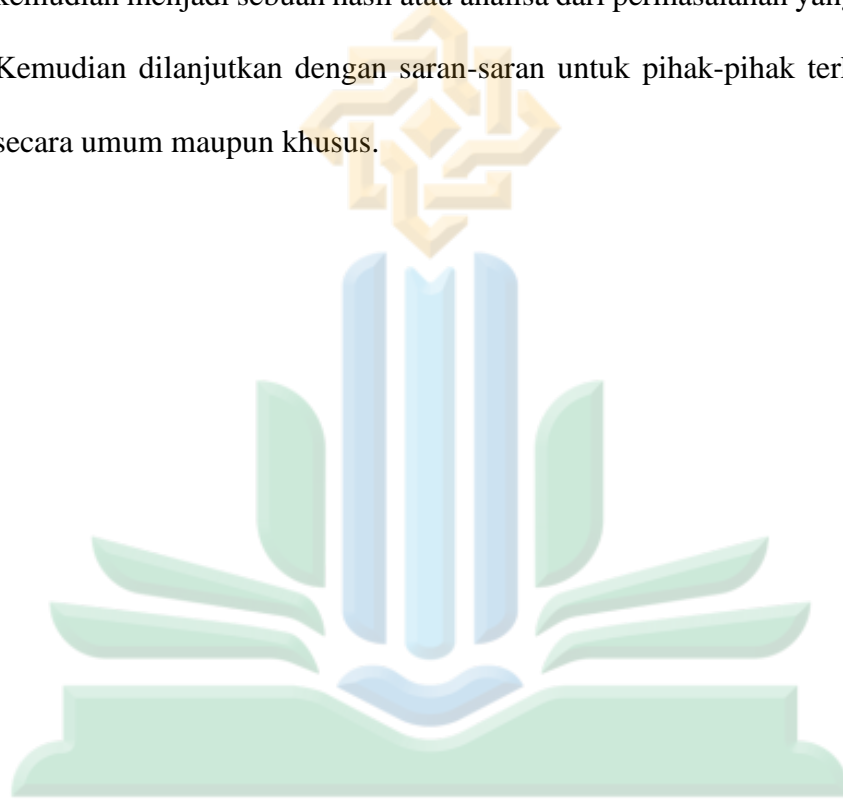
Dalam rangka untuk mempermudah dalam pengkajiannya, maka penulisan skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu. Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan ini dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti pada daftar isi.

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, hipotesis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu meliputi penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Sedangkan kajian teori membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

BAB III Penyajian Data dan Analisis, bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pengujian hipotesis serta pembahasan.

BAB IV Penutup, pembahasan pada bab terakhir ini adalah menarik kesimpulan dari serangkaian pembahasan di bab-bab sebelumnya, yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak terkait baik secara umum maupun khusus.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait pengaruh *good governance* terhadap pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Jhoin Sarjono (2021), dengan judul “Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wewangriu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Serta partisipasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.³¹

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *good governance* dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

³¹ Jhoin Sarjono, “Pengaruh *good governance* terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Studi pada Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

2. Suci Fajarini (2020), dengan judul “*Good Governance* Dalam Pengelolaan APBDesa”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis *good governance* dalam pengelolaan APBDesa di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan program APBDesa di Desa Tugusari telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipasi dan responsif. Pelaksanaan program APBDesa di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari telah menerapkan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, trsanparansi serta partisipasi.³²

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *good governance* dalam pengelolaan APBDesa. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan lokasi penelitian.

3. Nurul Farhana Puteri (2020), dengan judul “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui transparansi serta faktor yang menghambat transparansi pengelolaan keuangan Desa di Desa Salo Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

³² Suci Fajarini, “*Good governance* dalam pengelolaan APB Desa”, (Skripsi, IAIN Jember, 2020).

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan desa di Desa Salo Timur dilakukan secara transparansi, hal ini dibuktikan dengan analisa berbagai pertanyaan tentang beberapa indikator yang diajukan kepada aparatur desa maupun masyarakat yang sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam tahap perencanaan dilakukan kegiatan yang berupa musyawarah Pembangunan Desa atau Musrenbangdes yang melibatkan perangkat desa hingga masyarakat. Dalam tahap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Salo Timur adalah dengan cara mendokumentasikan setiap kegiatan agar memudahkan dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Serta faktor yang menghambat transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Salo Timur diantaranya beberapa sumber daya manusia yang kurang mengetahui mekanisme pengelolaan keuangan desa serta media massa yang kurang memadai untuk diketahui oleh masyarakat desa Salo Timur.³³

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang transparansi pengelolaan keuangan desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

4. Deli Mustika Devi (2019), dengan judul “Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. Penelitian

³³ Nurul Farhana Puteri, “Analisis transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”, (Skripsi, UIN Suska Riau, 2020).

ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang profesional dalam akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa dari aparatur pemerintah yang sumber dayanya belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sangat baik dan berpartisipasi. Laporan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu sudah dilaksanakan dengan baik. Penegakan supremasi hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu sejauh ini belum pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Serta adanya transparansi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu dalam bentuk papan informasi.³⁴

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

³⁴ Deli Mustika Devi, "Akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

5. Yany Kurniawati (2019), dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kembangarum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu adanya musrenbangdesa untuk mengapresiasi ide warga, partisipasi yang berisi kegiatan pembangunan secara rinci, serta adanya MMT (*Printer Metromedia Technologies*) yang dipasang di setiap perempatan jalan dan ditempel di depan kantor balai desa. Serta format laporan untuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai Pemendagri No. 113 Tahun 2014.³⁵

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

6. Rino Pandhu Wibowo (2018), dengan judul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus pada Desa Banjararum)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan *good governance* dan

³⁵ Yani Kurniawati, “Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”, (Skripsi, Universitas Semarang, 2019).

pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal dengan didapatkan hasil bahwa penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Desa Banjararum. Serta pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Desa Banjararum.³⁶

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *good governance* dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

7. Wahyu (2018), dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017 pada Desa Borong Pa’la’la di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Borong Pa’la’la dikatakan akuntabel karena sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor

³⁶ Rino Pandhu Wibowo, “Pengaruh penerapan *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Banjararum)”, (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018).

113 tahun 2014. Sedangkan dari segi transparansi Desa Borong Pa'la'la sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014.³⁷

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan lokasi penelitian.

8. Hilya 'Izzah (2018), dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan dan penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Pagaran Gala-gala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Pagaran Gala-Gala telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Pagaran Gala-Gala sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai

³⁷ Wahyu, “Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

pertanggungjawabannya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁸

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang akuntabilitas keuangan desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan lokasi penelitian.

9. Miftahuddin (2018), dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo, mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa di desa Panggungharjo, kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa atas pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD desa Panggungharjo atas pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan didapatkan hasil bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo melalui lembaga PSID (Pengelola Sistem Informasi

³⁸ Hilya ‘Izzah, “Analisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran GalaGala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018).

Desa) sangat baik. Pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi penggunaan Dana Desa, pemerintah desa hanya membuat laporan dengan format laporan seadanya. Dikarenakan belum adanya aturan spesifik yang membahas mengenai format yang seharusnya dilakukan.³⁹

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan lokasi penelitian.

10. Irma Nur Afni (2017), dengan judul “Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan didapatkan hasil bahwa bimbingan teknis berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi 4,97% dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa berpengaruh

³⁹ Miftahuddin, “Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa (Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018).

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi 9,18% serta pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi 14,21%.⁴⁰

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas keuangan desa dan metode penelitian yang digunakan.

Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh <i>good governance</i> terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur) (Jhoin Sarjono, 2021)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori	1. Sama-sama meneliti tentang pengaruh <i>good governance</i> terhadap pengelolaan keuangan desa. 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif.	1. Penelitian ini menggunakan variabel terikat APBDesa sedangkan penelitian dahulu menggunakan ADD. 2. Objek penelitian ini di Desa Rowotengah Kabupaten Jember sedangkan objek penelitian dahulu di Desa Wewangriu Kabupaten Luwu Timur.
2.	<i>Good governance</i> dalam pengelolaan APBDesa (Suci Fajarini, 2020)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Sama-sama meneliti tentang <i>good governance</i> dalam pengelolaan APBDesa	1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian dahulu menggunakan metode kualitatif. 2. Objek penelitian ini di Desa Rowotengah Kabupaten Jember sedangkan objek penelitian dahulu di Desa Banjarsari

⁴⁰ Irma Nur Afni, "Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017).

				Kabupaten Jember.
3.	<p>Analisis transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar</p> <p>(Nurul Farhana Puteri, 2020)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang transparansi pengelolaan keuangan desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan variabel bebas <i>good governance</i> yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sedangkan penelitian dahulu hanya menggunakan variabel transparansi. 2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian dahulu menggunakan metode kualitatif. 3. Objek penelitian ini di Desa Rowotengah Kabupaten Jember sedangkan objek penelitian dahulu di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.
4.	<p>Akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa dalam mewujudkan <i>good governance</i> di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan</p> <p>(Deli Mustika Devi, 2019)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan variabel bebas <i>good governance</i> yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sedangkan penelitian dahulu hanya menggunakan variabel akuntabilitas 2. Penelitian ini menggunakan variabel terikat APBDesa sedangkan penelitian dahulu menggunakan ADD. 3. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian dahulu menggunakan metode kualitatif. 4. Objek penelitian ini di Desa Rowotengah Kabupaten Jember

				sedangkan objek penelitian dahulu di Desa Aek Batu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5.	<p>Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)</p> <p>(Yany Kurniawati, 2019)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan variabel bebas <i>good governance</i> yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sedangkan penelitian dahulu hanya menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi. 2. Penelitian ini menggunakan variabel terikat APBDesa sedangkan penelitian dahulu menggunakan ADD. 3. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian dahulu menggunakan metode kualitatif. 4. Objek penelitian ini di Desa Rowotengah Kabupaten Jember sedangkan objek penelitian dahulu di Desa Kembangarum Kabupaten Demak.
6.	<p>Pengaruh penerapan <i>good governance</i> dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada desa Banjararum)</p> <p>(Rino Pandhu Wibowo, 2018)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama meneliti tentang <i>good governance</i> 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas yaitu <i>good governance</i> sedangkan penelitian dahulu menggunakan dua variabel bebas yaitu <i>good governance</i> dan pengendalian internal. 2. Objek penelitian ini di Desa Rowotengah Kabupaten Jember sedangkan objek penelitian

				dahulu di Desa Banjararum Kabupaten Kulon Progo.
7.	Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa (Wahyu, 2018)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi keuangan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian dahulu menggunakan metode kualitatif. 2. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu APBDesa sedangkan penelitian dahulu Alokasi Dana Desa (ADD). 3. Objek penelitian ini di Desa Rowotengah Kabupaten Jember sedangkan objek penelitian dahulu di Desa Borong Pa'la'la Kabupaten Gowa.
8.	Analisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina) (Hilya 'Izzah, 2018)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas keuangan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan variabel bebas <i>good governance</i> yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sedangkan penelitian dahulu hanya menggunakan variabel akuntabilitas 2. Penelitian ini menggunakan variabel terikat APBDesa sedangkan penelitian dahulu menggunakan ADD. 3. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian dahulu menggunakan kualitatif. 4. Objek penelitian ini di Desa Rowotengah Kabupaten Jember sedangkan objek penelitian dahulu di Desa Pagaran

				Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina
9.	Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa (Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) (Miftahuddin, 2018)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa	1. Penelitian ini menggunakan variabel bebas <i>good governance</i> yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sedangkan penelitian dahulu hanya menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi. 2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian dahulu menggunakan metode kualitatif. 3. Objek penelitian ini di Desa Rowotengah Kabupaten Jember sedangkan objek penelitian dahulu di Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul.
10.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen (Irma Nur Afni, 2017)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	1. Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas keuangan desa 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif	1. Penelitian ini menggunakan variabel bebas <i>good governance</i> yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sedangkan penelitian dahulu hanya menggunakan variabel akuntabilitas 2. Objek penelitian ini di Desa Rowotengah Kabupaten Jember sedangkan objek penelitian dahulu di Desa Urut Sewu Kabupaten Kebumen.

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Desa merupakan suatu kumpulan masyarakat yang dibentuk berdasarkan sejarah, budaya, nilai-nilai, hukum dan keistimewaan tertentu yang diterima dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia serta memiliki kekuasaan untuk mengurus, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.⁴¹ Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa atau sebutan lain yang dibantu perangkat Desa.⁴²

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas:⁴³

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Tertib kepentingan umum;

⁴¹ Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: READ, 2011), 3.

⁴² Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (1).

⁴³ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (24).

- 4) Transparansi;
- 5) Proporsionalitas;
- 6) Profesionalitas;
- 7) Akuntabilitas;
- 8) Efektivitas dan efisiensi;
- 9) Kearifan lokal;
- 10) Keberagaman; dan
- 11) Partisipatif.

2. *Good Governance*

a. *Pengertian Good Governance*

Menurut Mardiasmo *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola kepentingan-kepentingan publik.⁴⁴ World bank memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Dalam hal ini *World Bank* lebih memfokuskan pada cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi guna kepentingan pembangunan masyarakat. Sementara itu *United National Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nations affair at all levels*”. UNDP lebih memfokuskan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam penyelenggaraan keuangan negara. *Political*

⁴⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 22.

governance mengarah pada proses perumusan kebijakan. *Economic governance* mengarah pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berkaitan dengan masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem penerapan kebijakan.⁴⁵

Good Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu pengelolaan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang searah dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi pertumbuhan aktivitas usaha.⁴⁶

Penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha yakni upaya-upaya yang dilakukan pemerintah guna memberikan dukungan bagi aktivitas usaha atau ekonomi. *Legal framework* yaitu penciptaan undang-undang hukum yang menjadi aturan dalam aktivitas usaha serta *political framework* yaitu kebijakan politik yang mendorong terciptanya aktivitas usaha yang kondusif sehingga memacu tingkat perekonomian masyarakat.

⁴⁵ Lembaga Administrasi Negara & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LAN & BPKP), *Akuntabilitas dan Good Governance* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000), 5.

⁴⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 22-23.

Good Governance merupakan suatu wujud hubungan yang sinergis dan bernilai antara negara, sektor swasta, dan masyarakat dengan berpegangan pada prinsip-prinsip partisipasi; supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, serta bertanggungjawab. Dalam rangka memajukan pembangunan serta pemerintahan daerah yang berdaya guna bagi masyarakat, penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak terlepas dari peran masyarakat dan para pemangku kepentingan.⁴⁷

b. Prinsip *Good Governance*

Kucuran dana desa yang begitu besar, pelaporan yang beragam serta adanya titik kronis dalam pengelolaan keuangan desa menuntut adanya pertanggungjawaban yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, karena semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga tata kelola pemerintah desa yang baik dapat terwujud.

Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat merupakan prinsip yang dianggap sebagai prinsip utama yang mendasari *good governance*. Ketiga prinsip utama itulah yang akan

⁴⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 22-23.

ditekankan dalam penelitian ini sebagai standar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam mewujudkan *good governance*. Ketiga prinsip tersebut yaitu:

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (aparatur desa) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat maupun *stakeholder*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁴⁸ Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk kewajiban seorang perangkat desa untuk menjamin bahwa tugas dan amanat yang diembannya sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dinilai melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa tiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayahnya.

⁴⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 27.

2) Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai memberikan informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat dengan adanya pertimbangan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya desa yang dipercayakan kepadanya serta kepatuhannya kepada peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi tiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses perencanaan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

3) Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan warga desa dalam setiap pengambilan keputusan di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁰ Partisipasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan APBDesa. Dengan adanya partisipasi

⁴⁹ V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 28.

⁵⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 23.

masyarakat, dapat mendukung wewenang pemerintah desa dalam menganalisa kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

a. Pengertian Anggaran Publik

Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan berupa informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas dari suatu organisasi atau instansi pemerintah. Anggaran berisi estimasi kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberi informasi mengenai rencana yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.⁵¹

b. Pengertian APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa⁵² Menurut Yuliansyah dan Rusmianto APBDesa adalah dokumen resmi yang lahir dari hasil keputusan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja desa. APBDesa ditetapkan dengan tujuan untuk

⁵¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 76.

⁵² Sekretariat Negara RI, Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 1 ayat (8).

mendukung kegiatan pemerintah desa selama satu tahun serta sebagai sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja desa atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.⁵³ Defisit anggaran desa merupakan selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa. Sedangkan surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. APBDesa disusun dengan memerhatikan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan APBDesa tahun sebelumnya. Dalam suatu periode tertentu APBDesa digunakan sebagai alat untuk mengoordinasikan aktivitas perolehan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta menjadi landasan belanja dan pengeluaran pembiayaan bagi pemerintah desa.

Menurut Sumpeno APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang diputuskan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa bersangkutan.⁵⁴

Pada dasarnya penyusunan APBDesa dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDesa, pemerintah dan

⁵³ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 50.

⁵⁴ Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: READ, 2011), 213.

masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

c. Fungsi APBDesa

APBDesa memiliki beberapa fungsi antara lain:⁵⁵

- 1) Fungsi Otorisasi. APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi perencanaan. APBDesa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pijakan bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan. APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Fungsi alokasi. APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
- 5) Fungsi distribusi. Kebijakan APBDesa harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.

⁵⁵ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, 28.

6) Fungsi akuntabilitas. APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah dcesa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

d. Manfaat APBDesa

Setiap kebijakan yang ditetapkan pasti mempunyai manfaat tertentu, begitu juga dengan APBDesa. Manfaat penyusunan APBDesa antara lain sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- 2) Sebagai indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti mengajukan pinjaman atau jenis usaha lain.
- 4) Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

⁵⁶ Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: READ, 2011), 213.

- 5) Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa.
 - 6) Sebagai gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
 - 7) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.
- e. Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa⁵⁷
- 1) Transparansi, menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
 - 2) Akuntabilitas, menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.
 - 3) Partisipasi masyarakat, menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.

⁵⁷ Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: READ, 2011), 214.

- 4) Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDesa.
 - 5) Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
 - 6) Profesional, menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.
- f. Komponen-Komponen APBDesa

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 komponen-komponen dalam APBDesa antara lain:

1) Pendapatan

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pendapatan desa adalah seluruh penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan.⁵⁸

Sumber pendapatan desa dapat berasal dari:

⁵⁸ Sekretariat Negara RI, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 1 ayat (17).

a) Pendapatan Asli Desa

1. Hasil usaha desa. Misalnya desa memiliki badan usaha milik desa (Bumdes) dalam bidang usaha koperasi, maka hasil penjualannya masuk dalam hasil usaha desa.
2. Hasil kekayaan desa. Misalnya tanah desa, bangunan desa, pemandian desa, wisata yang dikelola desa, hutan desa, jaringan irigasi, dll.
3. Hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat, yakni membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga serta barang yang dapat dinilai dengan uang.
4. Lain-lain pendapatan asli desa, yakni hasil pungutan desa seperti ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.⁵⁹

b) Transfer

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.⁶⁰ Kelompok transfer terdiri atas:

⁵⁹ V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 40.

⁶⁰ Sekretariat Negara RI, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 10.

1. Dana desa. Yaitu dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah. Misalnya bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
3. Alokasi dana desa. Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh daerah kabupaten/kota untuk desa. Sumber dana ini adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Bantuan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan, dengan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.⁶¹

⁶¹ V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 41.

c) Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas:

1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Yakni pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
2. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Misalnya pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2) Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 belanja desa merupakan semua bentuk pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa selama satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.⁶² Belanja desa terdiri dari beberapa bidang, yaitu:

a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja ini meliputi beberapa jenis antara lain:

1. Belanja pegawai, jenis belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

⁶² Sekretariat Negara RI, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 12.

2. Operasional perkantoran, yaitu terdiri dari:

- a. Belanja barang dan jasa. Misalnya belanja alat tulis kantor, cetak/penggandaan, pemeliharaan, bahan/material, benda pos, sewa kantor desa, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, pakaian dinas dan atributnya, makanan dan minuman rapat, perjalanan kerja, upah kerja, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan uang untuk operasional RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perencanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa) dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.⁶³
- b. Belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan

⁶³ V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 42.

kewenangan desa, misalnya beli komputer, printer, meja, dll.⁶⁴

b) Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja ini merupakan belanja yang digunakan untuk keperluan pembangunan desa seperti pengaspalan jalan, perbaikan saluran irigasi, pembangunan gapura, dll.

c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa seperti pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan karang taruna, pendanaan untuk kegiatan kaderisasi, dll.

d) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri, dll.

e) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

⁶⁴ Sekretariat Negara RI, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 14-17.

Belanja pada sub bidang tersebut paling sedikit memenuhi kriteria berikut:

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali pemerintah desa.

3) Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.⁶⁵ Pembiayaan terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA mencakup pelimpahan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Hal tersebut seperti kelebihan penerimaan pendapatan asli desa, kelebihan penerimaan pembiayaan, kelebihan penerimaan alokasi dana desa, penghematan belanja, sisa dana kegiatan.

⁶⁵ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), 206.

SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2. Pencairan dana cadangan, yaitu digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.⁶⁶

b) Pengeluaran pembiayaan, meliputi:

1. Pembentukan dana cadangan. Dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit

⁶⁶ Sekretariat Negara RI, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 18.

memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; sumber dana cadangan; dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2. Penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat berinvestasi pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui oleh BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.⁶⁷

⁶⁷ Sekretariat Negara RI, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 19.

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember merupakan salah satu desa dari 226 Desa di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat. Desa Rowotengah memiliki tiga Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Gondosari dan Dusun Sadengan. Sebagian besar masyarakat di Desa Rowotengah memiliki mata pencaharian sebagai petani.

1. Sejarah Asal Usul Desa

Sesuai dengan namanya arti Rowotengah dalam bahasa Indonesia adalah tengah rawa-rawa. Dahulu, desa Rowotengah bukan tempat pemukiman dan jarang dijamah oleh manusia dikarenakan tempat ini dulunya merupakan rawa-rawa yang sangat luas dan hanya sedikit daratannya. Desa ini dulunya hanya dianggap daerah mati karena pemukiman penduduknya hanya sedikit serta akses menuju desa sangatlah sulit. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan daratan masih tertutup perairan dan tanah lumpur.

Hingga pada tahun 1930 Belanda mulai datang dan melirik daerah ini. Pada awal kedatangannya Belanda berencana membuat daerah perairan ini surut drastis. Hal ini merupakan sebagai upaya untuk dapat memanfaatkan tanah yang ada didaerah tersebut. Belanda membuat saluran air yang diarahkan ke sungai, disamping itu Belanda juga melakukan penyedotan besar-besaran guna mempercepat penyurutan air.

Rowotengah mulai dapat berkembang ketika Belanda hampir selesai melaksanakan proyeknya. Daratan didaerah ini mulai dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Masyarakat juga banyak yang membuat pemukiman baru

Seiring berjalannya waktu daerah tersebut sudah sadar akan membentuk struktural desanya. Noeryoredjo merupakan orang yang dianggap sesepuh didaerah tersebut dan menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan Belanda kala itu. Kemudian secara administratif Desa Rowotengah resmi pada tahun 1932.

2. Keadaan Geografis Desa

a. Batas Wilayah

Sebelah Timur : Desa Pondok Joyo Kecamatan Semboro

Sebelah Barat : Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru

Sebelah Utara : Desa Pringgowirawan Kecamatan

Sumberbaru

Sebelah Selatan : Desa Sumberagung Kecamatan

Sumberbaru

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Rowotengah sekitar 1232 Ha dengan rincian sebesar 700 Ha digunakan sebagai lahan pertanian, 300 Ha digunakan sebagai pemukiman serta sisanya digunakan sebagai sarana umum.

c. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Rowotengah merupakan dataran rendah yang terletak dipinggir sungai Bondoyudo, dimana sungai Bondoyudo merupakan sungai yang bersumber dari Pegunungan Semeru. Iklim Desa Rowotengah sama dengan desa lain di wilayah Indonesia yakni beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

d. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Desa Rowotengah terdiri dari tiga Dusun yakni Dusun Krajan, Dusun Gondosari dan Dusun Sadengan. Desa Rowotengah memiliki 17 Rukun Warga (RW) dan 50 Rukun Tetangga (RT) serta Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) sebanyak 9 orang.

e. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi Kabupaten Jember tahun 2021, Desa Rowotengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.048 jiwa dengan rincian 5.542 laki-laki dan 5.506 perempuan. Jumlah penduduk tersebut tergabung dalam 3.460 KK.

3. Visi dan Misi Desa Rowotengah

a. Visi

Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, makmur dan sejahtera.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan umum.
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana umum.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan gotong royong masyarakat.
- 5) Meningkatkan ketertiban, ketentraman dan kualitas hidup beragama serta kerukunan antar umat beragama.

4. Formasi Aparatur Pemerintah Desa

Tabel 3.1
Formasi Aparatur Pemerintah Desa Rowotengah

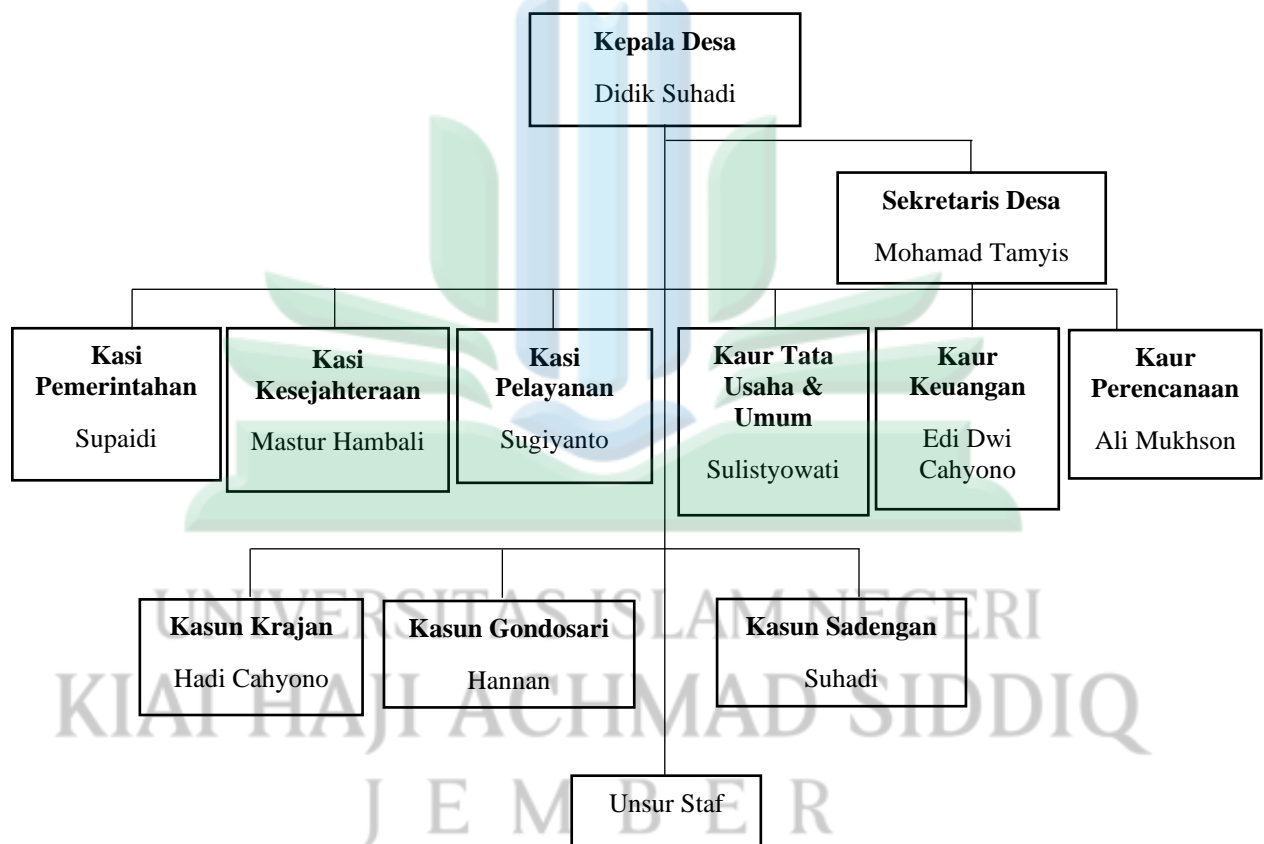
No.	Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala Desa	Didik Suhadi
2.	Sekertaris	Muhammad Tamyis
3.	Kasi Pemerintahan	Supaidi
4.	Kasi Kesejahteraan	Mastur Hambali
5.	Kasi Pelayanan	Sugiyanto
6.	Kaur Tata Usaha dan Umum	Sulistyowati
7.	Kaur Keuangan	Edi Dwi Cahyono
8.	Kaur Perencanaan	Ali Mukhson
9.	Kepala Dusun Krajan	Hadi Cahyono
10.	Kepala Dusun Gondosari	Hannan
11.	Kepala Dusun Sadengan	Suhadi
12.	Staf	Yana Indrianti
13.	Staf	Yolanda Dewi Rustantia
14.	Staf	Subowo
15.	Ketua BPD	Abdul Qodir
16.	Wakil Ketua BPD	Holyadi
17.	Sekretaris BPD	Siti Rohmadul Masjidah
18.	Anggota BPD	Siti Aisyah

19.	Anggota BPD	Imam Junaidi
20.	Anggota BPD	Suma'iyah
21.	Anggota BPD	Abdullah Murtadho
22.	Anggota BPD	Titis Widodo
23.	Anggota BPD	Firmansyah

Sumber: Observasi Kantor Desa Rowotengah 2022

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rowotengah

Gambar 3.1
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rowotengah



Sumber : Observasi Kantor Desa Rowotengah 2022

B. Penyajian Data

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 orang yang meliputi seluruh Aparatur Pemerintah Desa

Rowotengah berjumlah 14 orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 9 orang dan Ketua RW berjumlah 17 orang. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian, kuesioner yang dibagikan berjumlah 40 lembar, serta semua kuesioner dikembalikan kepada peneliti dan semua data dapat diolah. Data mengenai jumlah kuesioner dibagikan dan pengembalian kuesioner tersebut dideskripsikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.2
Rincian Pembagian dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang dibagikan	40	100%
Kuesioner yang mendapat respon	40	100%
Kuesioner yang dapat diolah	40	100%
Kuesioner yang tidak mendapat respon	0	0%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan hasil pengumpulan data, karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja responden. Adapun rincian karakteristik responden tersebut sebagai berikut:

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.3
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	34	85%
2.	Perempuan	6	15%
	Total	40	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 3.3 diatas diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 34 orang dengan

presentase 85%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang dengan presentase 15%.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3.4
Usia Responden

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1.	Dibawah 35 tahun	3	7,5%
2.	35-45 tahun	9	22,5%
3.	45-55 tahun	16	40%
4.	Diatas 55 tahun	12	26%
	Total	40	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 3.4 diatas diketahui bahwa sebanyak 16 orang dengan presentase 40% menduduki tingkat pertama sebagai mayoritas responden dengan kisaran usia 45-55 tahun. Selanjutnya diikuti usia diatas 55 tahun sebanyak 12 orang dengan presentase 26% dan usia 35-45 tahun sebanyak 9 orang dengan presentase 22,5% serta usia dibawah 35 tahun sebanyak 3 orang dengan presentase 7,5%.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.5
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SD	5	12,5%
2.	SMP	3	7,5%
3.	SMA	21	52,5%
4.	DIPLOMA	0	0%
5.	SARJANA	11	27,5%
	Total	40	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 3.5 diatas diketahui bahwa sebanyak 21 orang dengan presentase 52,5% menduduki tingkat pertama sebagai mayoritas responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA. Selanjutnya

diikuti tingkat pendidikan terakhir SARJANA sebanyak 11 orang dengan presentase 27,5%, SD sebanyak 5 orang dengan presentase 12,5% dan SMP sebanyak 3 orang dengan presentase 7,5% serta responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir DIPLOMA tidak ada.

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 3.6
Masa Kerja Responden

No.	Masa Kerja	Jumlah	Presentase
1.	< 5 tahun	16	40%
2.	5-15 tahun	18	45%
3.	15-25 tahun	6	15%
4.	> 25 tahun	0	0%
	Total	40	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 3.6 diatas diketahui bahwa sebanyak 18 orang dengan presentase 45% menduduki tingkat pertama sebagai mayoritas responden yang memiliki masa kerja selama 5-15 tahun. Selanjutnya diikuti masa kerja < 5 tahun sebanyak 16 orang dengan presentase 40% serta masa kerja 15-25 tahun sebanyak 6 orang dengan presentase 15%.

C. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti guna mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner

tersebut.⁶⁸ Pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam kuesioner dikatakan valid apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel.

Hasil uji validitas menggunakan *IBM SPSS Statistic 22.0* untuk variabel Akuntabilitas (X1) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	0,635	0,312	Valid
2.	0,716	0,312	Valid
3.	0,757	0,312	Valid
4.	0,783	0,312	Valid
5.	0,678	0,312	Valid

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai r hitung $\geq r$ tabel yaitu sebesar 0,312, sehingga instrumen variabel akuntabilitas yang terdiri dari 5 pernyataan, masing-masing pernyataannya dinyatakan valid. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang ada pada variabel akuntabilitas dapat digunakan sebagai data penelitian.

Hasil uji validitas menggunakan *IBM SPSS Statistic 22.0* untuk variabel Transparansi (X2) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	0,407	0,312	Valid
2.	0,464	0,312	Valid
3.	0,370	0,312	Valid
4.	0,365	0,312	Valid
5.	0,456	0,312	Valid

⁶⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2006) hlm 45.

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai r hitung $\geq r$ tabel yaitu sebesar 0,312, sehingga instrumen variabel transparansi yang terdiri dari 5 pernyataan, masing-masing pernyataannya dinyatakan valid. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang ada pada variabel transparansi dapat digunakan sebagai data penelitian.

Hasil uji validitas menggunakan *IBM SPSS Statistic 22.0* untuk variabel Partisipasi (X3) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	0,730	0,312	Valid
2.	0,467	0,312	Valid
3.	0,584	0,312	Valid
4.	0,587	0,312	Valid
5.	0,391	0,312	Valid

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa variabel partisipasi memiliki nilai r hitung $\geq r$ tabel yaitu sebesar 0,312, sehingga instrumen variabel partisipasi yang terdiri dari 5 pernyataan, masing-masing pernyataannya dinyatakan valid. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang ada pada variabel partisipasi dapat digunakan sebagai data penelitian.

Hasil uji validitas menggunakan *IBM SPSS Statistic 22.0* untuk variabel Pengelolaan APBDesa (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan APBDesa

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	0,829	0,312	Valid
2.	0,829	0,312	Valid
3.	0,778	0,312	Valid
4.	0,798	0,312	Valid
5.	0,520	0,312	Valid

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel 3.10 menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan APBDesa memiliki nilai r hitung $\geq r$ tabel yaitu sebesar 0,312, sehingga instrumen variabel Pengelolaan APBDesa yang terdiri dari 5 pernyataan, masing-masing pernyataannya dinyatakan valid. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang ada pada variabel Pengelolaan APBDesa dapat digunakan sebagai data penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.⁶⁹ Hasil uji reliabilitas menggunakan *IBM SPSS Statistic 22.0* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas	0,759	Reliabel
Transparansi	0,857	Reliabel
Partisipasi	0,712	Reliabel
Pengelolaan APBDesa	0,835	Reliabel

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

⁶⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2006) hlm 41.

Tabel 3.11 menunjukkan bahwa masing-masing variabel dalam penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel penelitian berada diantara 0,70 sampai dengan 0,90, maka tingkat reliabilitas variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengelolaan APBDesa berada pada klasifikasi yang tinggi. Oleh karena itu seluruh instrumen dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif menggambarkan data dari masing-masing variabel yang telah diolah menggunakan SPSS. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap data penelitian menggunakan *IBM SPSS Statistic 22.0* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Range	Min	Max	Mean	Standar Deviasi	Varian
Akuntabilitas	40	5	20	25	23,00	1,754	3,077
Transparansi	40	5	20	25	22,85	1,075	1,156
Partisipasi	40	4	21	25	22,00	1,301	1,692
Pengelolaan APBDesa	40	4	20	25	20,95	1,501	2,254

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

a. Variabel Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas terdiri dari 5 *item* pernyataan dimana seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid dan reliabel. Penetapan skor menggunakan skala *likert* yang terdiri dari 5 jawaban (5= sangat setuju, 4= setuju, 3= ragu-ragu, 2= tidak setuju, dan 1=sangat tidak

setuju). Skor maksimum yang mungkin diperoleh $5 \times 5 = 25$ dan skor minimum yang mungkin diperoleh $5 \times 1 = 5$.

Berdasarkan tabel 3.12 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 23 dengan skor maksimum 25 yang diperoleh dari pernyataan yang menjawab dengan nilai 5 = sangat setuju sedangkan skor minimum 20 yang diperoleh dari pernyataan yang menjawab dengan nilai 4 = setuju serta standar deviasinya 1,754 dan varian 3,077. Panjang jangkauan adalah $(25-20) + 1 = 6$. Jumlah kelas interval adalah $1 + 3,3 \log 40 = 6,286$ (dibulatkan menjadi 6) dan panjang kelas $6 / 6 = 1$. Maka didapatkan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 3.13
Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas

Kelas Interval	Frekuensi
20	5
21	5
22	5
23	5
24	10
25	10
Jumlah	40

Sumber: data primer diolah

Selanjutnya, data variabel akuntabilitas dikelompokkan menjadi lima kategori berdasarkan kecenderungannya. Kelima kategori tersebut yaitu sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Hasil distribusi kecenderungan data variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Frekuensi Kategori Variabel Akuntabilitas

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	$20 < X \leq 25$	35	87,5%	Sangat Baik
2	$16 < X \leq 20$	5	12,5%	Baik
3	$14 < X \leq 16$	-	-	Sedang
4	$10 < X \leq 14$	-	-	Buruk
5	$5 < X \leq 10$	-	-	Sangat Buruk

Sumber: data primer diolah

Tabel 3.14 menunjukkan bahwa frekuensi akuntabilitas yang termasuk kategori sangat baik sebanyak 35 responden dengan presentase 87,5% dan kategori baik sebanyak 7 responden dengan presentase 12,5%. Mayoritas responden beranggapan bahwa variabel akuntabilitas berada pada kategori sangat baik.

b. Variabel Transparansi

Variabel transparansi terdiri dari 5 *item* pernyataan dimana seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid dan reliabel. Penetapan skor menggunakan skala *likert* yang terdiri dari 5 jawaban (5= sangat setuju, 4= setuju, 3= ragu-ragu, 2= tidak setuju, dan 1=sangat tidak setuju). Skor maksimum yang mungkin diperoleh $5 \times 5 = 25$ dan skor minimum yang mungkin diperoleh $5 \times 1 = 5$.

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa variabel transparansi memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 21,73 dengan skor maksimum 25 yang diperoleh dari pernyataan yang menjawab dengan nilai 5 = sangat setuju sedangkan skor minimum 20 yang diperoleh dari pernyataan yang menjawab dengan nilai 4 = setuju serta standar deviasinya 1,797 dan varian 3,230. Panjang jangkauan adalah (25-20)

+1 = 6. Jumlah kelas interval adalah $1 + 3,3 \log 40 = 6,286$ (dibulatkan menjadi 6) dan panjang kelas $6 / 6 = 1$. Maka didapatkan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 3.15
Distribusi Frekuensi Variabel Transparansi

Kelas Interval	Frekuensi
20	11
21	15
22	3
23	3
24	1
25	7
Jumlah	40

Sumber: data primer diolah

Selanjutnya, data variabel transparansi dikelompokkan menjadi lima kategori berdasarkan kecenderungannya. Kelima kategori tersebut yaitu sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Hasil distribusi kecenderungan data variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Frekuensi Kategori Variabel Transparansi

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	$20 < X \leq 25$	29	72,5%	Sangat Baik
2	$16 < X \leq 20$	11	27,5%	Baik
3	$14 < X \leq 16$	-	-	Sedang
4	$10 < X \leq 14$	-	-	Buruk
5	$5 < X \leq 10$	-	-	Sangat Buruk

Sumber: data primer diolah

Tabel 3.16 menunjukkan bahwa frekuensi transparansi yang termasuk kategori sangat baik sebanyak 29 responden dengan presentase 72,5% dan kategori baik sebanyak 11 responden dengan

presentase 27,5%. Mayoritas responden beranggapan bahwa variabel transparansi berada pada kategori sangat baik

c. Variabel Partisipasi

Variabel partisipasi terdiri dari 5 *item* pernyataan dimana seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid dan reliabel. Penetapan skor menggunakan skala *likert* yang terdiri dari 5 jawaban (5= sangat setuju, 4= setuju, 3= ragu-ragu, 2= tidak setuju, dan 1=sangat tidak setuju). Skor maksimum yang mungkin diperoleh $5 \times 5 = 25$ dan skor minimum yang mungkin diperoleh $5 \times 1 = 5$.

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa variabel partisipasi memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 22,00 dengan skor maksimum 25 yang diperoleh dari pernyataan yang menjawab dengan nilai 5 = sangat setuju sedangkan skor minimum 21 yang diperoleh dari pernyataan yang menjawab dengan nilai 4 = setuju serta standar deviasinya 1,301 dan varian 1,692. Panjang jangkauan adalah $(25-21) + 1 = 5$. Jumlah kelas interval adalah $1 + 3,3 \log 40 = 6,286$ (dibulatkan menjadi 6) dan panjang kelas $5 / 6 = 0,833$ (dibulatkan menjadi 1). Maka didapatkan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 3.17
Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi

Kelas Interval	Frekuensi
20	0
21	18
22	14
23	3
24	0

25	5
Jumlah	40

Sumber: data primer diolah

Selanjutnya, data variabel partisipasi dikelompokkan menjadi lima kategori berdasarkan kecenderungannya. Kelima kategori tersebut yaitu sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Hasil distribusi kecenderungan data variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Frekuensi Kategori Variabel Partisipasi

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	$20 < X \leq 25$	40	100%	Sangat Baik
2	$16 < X \leq 20$	-	-	Baik
3	$14 < X \leq 16$	-	-	Sedang
4	$10 < X \leq 14$	-	-	Buruk
5	$5 < X \leq 10$	-	-	Sangat Buruk

Sumber: data primer diolah

Tabel 3.18 menunjukkan bahwa frekuensi partisipasi termasuk kategori sangat baik sebanyak 40 responden dengan presentase 100%. Mayoritas responden beranggapan bahwa variabel partisipasi berada pada kategori sangat baik.

d. Variabel Pengelolaan APBDesa

Variabel pengelolaan APBDesa terdiri dari 5 *item* pernyataan dimana seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid dan reliabel. Penetapan skor menggunakan skala *likert* yang terdiri dari 5 jawaban (5= sangat setuju, 4= setuju, 3= ragu-ragu, 2= tidak setuju, dan 1=sangat tidak setuju). Skor maksimum yang mungkin diperoleh $5 \times 5 = 25$ dan skor minimum yang mungkin diperoleh $5 \times 1 = 5$.

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa variabel pengelolaan APBDesa memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 20,83 dengan skor maksimum 25 yang diperoleh dari pernyataan yang menjawab dengan nilai 5 = sangat setuju sedangkan skor minimum 20 yang diperoleh dari pernyataan yang menjawab dengan nilai 4 = setuju serta standar deviasinya 1,412 dan varian 1,994. Panjang jangkauan adalah $(25-20) + 1 = 6$. Jumlah kelas interval adalah $1 + 3,3 \log 40 = 6,286$ (dibulatkan menjadi 6) dan panjang kelas $6 / 6 = 1$. Maka didapatkan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 3.19
Distribusi Frekuensi Variabel Pengelolaan APBDesa

Kelas Interval	Frekuensi
20	24
21	10
22	1
23	1
24	2
25	2
Jumlah	40

Sumber: data primer diolah

Selanjutnya, data variabel pengelolaan APBDesa dikelompokkan menjadi lima kategori berdasarkan kecenderungannya. Kelima kategori tersebut yaitu sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Hasil distribusi kecenderungan data variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Frekuensi Kategori Variabel Pengelolaan APBDesa

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	$20 < X \leq 25$	16	40%	Sangat Baik
2	$16 < X \leq 20$	24	60%	Baik
3	$14 < X \leq 16$	-	-	Sedang

4	$10 < X \leq 14$	-	-	Buruk
5	$5 < X \leq 10$	-	-	Sangat Buruk

Sumber: data primer diolah

Tabel 3.20 menunjukkan bahwa frekuensi pengelolaan APBDesa yang termasuk kategori sangat baik sebanyak 16 responden dengan presentase 40% dan kategori baik sebanyak 24 responden dengan presentase 60%. Mayoritas responden beranggapan bahwa variabel pengelolaan APBDesa berada pada kategori baik.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,84659745
Most Extreme Differences	Absolute	,113
	Positive	,112
	Negative	-,113
Test Statistic		,113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel 3.21 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,200 $>$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini

dinyatakan berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam model regresi.

b. Multikolinearitas

Terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factors* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Apabila nilai VIF < 10 atau nilai *Tolerance* > 0,1 maka tidak terdapat multikolinearitas, begitupun sebaliknya. Suatu model regresi yang baik tidak boleh terdapat korelasi diantara variabel bebas. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Perhitungan		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Akuntabilitas	0,733	1,363	Tidak multikolinearitas
Transparansi	0,985	1,015	Tidak multikolinearitas
Partisipasi	0,740	1,352	Tidak multikolinearitas

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel 3.22 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan *Varian Inflation Factors* (VIF) < 10. Variabel akuntabilitas memiliki nilai *tolerance* 0,733 dan VIF 1,363, variabel transparansi memiliki nilai *tolerance* 0,985 dan VIF 1,015 serta variabel partisipasi memiliki nilai *tolerance* 0,740 dan VIF 1,352. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linear diantara variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sehingga data variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dapat digunakan dalam uji regresi.

c. Heteroskedastisitas

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *Glejser* dan taraf signifikansi 5%. Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil analisis heteroskedastisitas terhadap data penelitian menggunakan *IBM SPSS Statistic 22.0* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Signifikansi	Keterangan
Akuntabilitas	0,216	Tidak heteroskedastisitas
Transparansi	0,392	Tidak heteroskedastisitas
Partisipasi	0,281	Tidak heteroskedastisitas

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel 3.23 menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikansi 0,216, variabel transparansi memiliki nilai signifikansi 0,392 dan variabel partisipasi memiliki nilai signifikansi 0,281. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi tidak terjadi perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain sehingga data variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dapat digunakan dalam uji regresi.

4. Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Hasil pengujian

hipotesis menggunakan *IBM SPSS Statistics 22.0* dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.24
Hasil Uji Hipotesis

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.826 ^a	.682	.655	.881
a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas				

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59,948	3	19,983	25,736	.000 ^b
	Residual	27,952	36	,776		
	Total	87,900	39			
a. Dependent Variable: Pengelolaan_APBDesa						
b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas						

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-16,097	4,974		-3,236	,003
	Akuntabilitas	,203	,094	,238	2,165	,037
	Transparansi	,518	,132	,371	3,915	,000
	Partisipasi	,934	,126	,809	7,405	,000
a. Dependent Variable: Pengelolaan_APBDesa						

Variabel	Nilai t Hitung	Nilai t Tabel	Nilai signifikansi	Keterangan
Akuntabilitas	2,165	2,028	0,037	H ₁ diterima
Transparansi	3,915	2,028	0,000	H ₁ diterima
Partisipasi	7,405	2,028	0,000	H ₁ diterima

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

a. Koefisien Korelasi (R)

Tabel 3.24 menunjukkan bahwa korelasi bernilai positif. Hal ini menyatakan bahwa ketiga variabel independen (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) memiliki hubungan yang positif atau searah dengan variabel dependen (variabel pengelolaan APBDesa).

b. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Tabel 3.24 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,655. Hal ini berarti variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi mampu menjelaskan varian variabel pengelolaan APBDesa sebesar 65,5%, sedangkan sisanya sebesar 34,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

c. Uji t (Parsial)

(1) Variabel Akuntabilitas (X1)

Tabel 3.24 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai t lebih besar dari nilai t tabel yaitu $2,165 > 2,028$ dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu $0,037 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan APBDesa.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBDesa. Maka berdasarkan nilai korelasi (R), nilai

determinasi (*Adjusted R Square*) nilai F hitung dan nilai t hitung yang dihasilkan dalam pengujian ini, dapat dinyatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap variabel pengelolaan APBDesa dan hipotesis pertama (H_1) diterima.

(2) Variabel Transparansi (X2)

Tabel 3.24 menunjukkan bahwa variabel transparansi (X2) memiliki nilai t lebih besar dari nilai t tabel yaitu $3,915 > 2,028$ dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan APBDesa.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa penerapan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBDesa. Maka berdasarkan nilai korelasi (R), nilai determinasi (*Adjusted R Square*), nilai F hitung dan nilai t hitung yang dihasilkan dalam pengujian ini, dapat dinyatakan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap variabel pengelolaan APBDesa sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima.

(3) Variabel Partisipasi (X3)

Tabel 3.24 menunjukkan bahwa variabel partisipasi (X3) memiliki nilai t lebih besar dari nilai t tabel yaitu $7,405 > 2,028$ dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa

variabel partisipasi berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan APBDesa.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa penerapan partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBDesa. Maka berdasarkan nilai korelasi (R), nilai determinasi (*Adjusted R Square*) nilai F hitung dan nilai t hitung yang dihasilkan dalam pengujian ini, dapat dinyatakan bahwa variabel partisipasi berpengaruh positif terhadap variabel pengelolaan APBDesa dan hipotesis ketiga (H_3) diterima.

d. Uji F (Simultan)

Tabel 3.24 menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yaitu $25,736 > 2,87$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya salah satu dari ketiga variabel independen (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan APBDesa.

D. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,655. Artinya variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi mampu menjelaskan varian variabel pengelolaan APBDesa sebesar 65,5% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model regresi yaitu sebesar 34,5%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rino Pandhu Wibowo

(2018)⁷⁰ yang menyatakan bahwa penerapan *good governance* (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

1. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan APBDesa pada Pemerintah Desa Rowotengah

Berdasarkan analisis data sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H_1) yaitu penerapan prinsip akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan APBDesa. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai t hitung memiliki angka positif dan lebih besar dari nilai t tabel yaitu $2,165 > 2,028$ dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu $0,037 < 0,05$.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diterapkannya akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa membuat kinerja Pemerintah Desa Rowotengah menjadi lebih ekonomis, efektif dan efisien. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penerapan akuntabilitas berjalan searah dengan pengelolaan APBDesa, semakin tinggi penerapan akuntabilitas maka semakin baik pula kinerja Pemerintah Desa Rowotengah dalam pengelolaan APBDesa. Begitu pula sebaliknya semakin rendah penerapan akuntabilitas maka semakin rendah pula kinerja Pemerintah Desa Rowotengah dalam pengelolaan APBDesa.

⁷⁰ Rino Pandhu Wibowo, "Pengaruh penerapan *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Banjararum)", (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDesa dapat dipengaruhi oleh faktor akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan teori Wahjudin Sumpeno yang menyatakan bahwa pengelolaan APBDesa dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya akuntabilitas.⁷¹ Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa dapat dilihat dari jawaban responden dalam hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel akuntabilitas yang menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pada Pemerintah Desa Rowotengah tergolong dalam kategori sangat baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kontradiksi dengan fenomena penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Dimana fenomena penelitian menyatakan bahwa aksesibilitas pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa Rowotengah belum efektif, sehingga dapat diartikan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa kurang maksimal. Sedangkan hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan fenomena tersebut yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBDesa. Adanya kontradiksi tersebut dikarenakan responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Desa Rowotengah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Ketua RW. Dimana para responden memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi tentang laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa.

⁷¹ Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, 214.

2. Pengaruh Penerapan Transparansi terhadap Pengelolaan APBDesa pada Pemerintah Desa Rowotengah

Berdasarkan analisis data sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis kedua (H_2) yaitu penerapan prinsip transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan APBDesa. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai t hitung memiliki angka positif dan lebih besar dari nilai t tabel yaitu $3,915 > 2,028$ dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diterapkannya transparansi dalam pengelolaan APBDesa membuat kinerja Pemerintah Desa Rowotengah menjadi lebih ekonomis, efektif dan efisien. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penerapan transparansi berjalan searah dengan pengelolaan APBDesa, semakin tinggi penerapan transparansi maka semakin baik pula kinerja Pemerintah Desa Rowotengah dalam pengelolaan APBDesa. Begitu pula sebaliknya semakin rendah penerapan transparansi maka semakin rendah pula kinerja Pemerintah Desa Rowotengah dalam pengelolaan APBDesa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDesa dapat dipengaruhi oleh faktor transparansi. Hal ini sesuai dengan teori Wahjudin Sumpeno yang menyatakan bahwa pengelolaan APBDesa dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya transparansi. Penerapan transparansi dalam pengelolaan APBDesa dapat dilihat dari jawaban

responden dalam hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel transparansi yang menunjukkan bahwa penerapan transparansi pada Pemerintah Desa Rowotengah tergolong dalam kategori sangat baik.

3. Pengaruh Penerapan Partisipasi terhadap Pengelolaan APBDesa pada Pemerintah Desa Rowotengah

Berdasarkan analisis data sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H_3) yaitu penerapan prinsip partisipasi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan APBDesa. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai t hitung memiliki angka positif dan lebih besar dari nilai t tabel yaitu $7,405 > 2,028$ dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diterapkannya partisipasi dalam pengelolaan APBDesa membuat kinerja Pemerintah Desa Rowotengah menjadi lebih ekonomis, efektif dan efisien. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penerapan partisipasi berjalan searah dengan pengelolaan APBDesa, semakin tinggi penerapan partisipasi maka semakin baik pula kinerja Pemerintah Desa Rowotengah dalam pengelolaan APBDesa. Begitu pula sebaliknya semakin rendah penerapan partisipasi maka semakin rendah pula kinerja Pemerintah Desa Rowotengah dalam pengelolaan APBDesa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDesa dapat dipengaruhi oleh faktor partisipasi. Hal ini sesuai dengan teori

Wahjudin Sumpeno yang menyatakan bahwa pengelolaan APBDesa dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya partisipasi. Penerapan partisipasi dalam pengelolaan APBDesa dapat dilihat dari jawaban responden dalam hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel partisipasi yang menunjukkan bahwa penerapan partisipasi pada Pemerintah Desa Rowotengah tergolong dalam kategori sangat baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan prinsip *good governance* terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

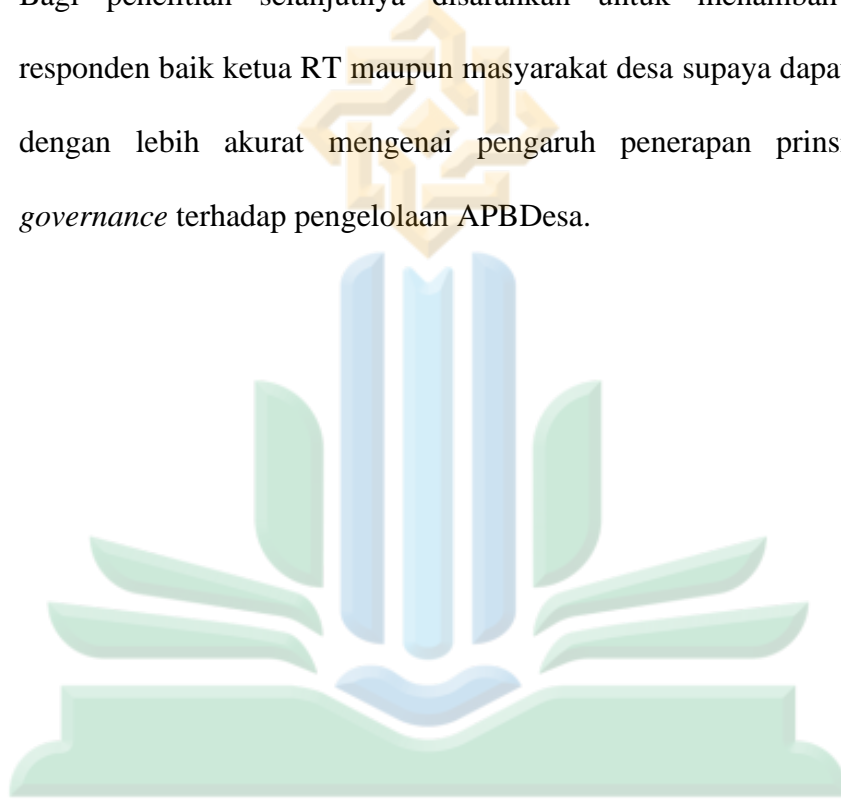
1. Penerapan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah.
2. Penerapan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah.
3. Penerapan partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Pemerintah Desa Rowotengah.

B. Saran

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi hanya mampu menjelaskan varian variabel pengelolaan APBDesa sebesar 65,5%. Sedangkan sisanya sebesar 34,5% menunjukkan bahwa variabel pengelolaan APBDesa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian. Oleh karena itu pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah lagi variabel-variabel

independen lain seperti Pengendalian Internal, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Pegawai, Motivasi, dan sebagainya.

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden baik ketua RT maupun masyarakat desa supaya dapat menilai dengan lebih akurat mengenai pengaruh penerapan prinsip *good governance* terhadap pengelolaan APBDesa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- 'Izzah, Hilya. 2018. Analisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran GalaGala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina). Skripsi. Tidak Diterbitkan. UIN Sumatera Utara: Sumatera Utara
- Afni, Irma Nur. 2017. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Agustina, Kania. 2019. *Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2007. *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Devi, Deli Mustika. 2019. Akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Sumatera Utara.
- Fajarini, Suci. 2020. Good governance dalam pengelolaan APB Desa. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Institut Agama Islam Negeri Jember: Jember.
- Ghazali, Imam. 2002. *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Semarang: Yoga Pratama.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Erlangga.
- Husnul, Nisak Ruwah Ibnatur, Eka Rima Prasetya, Prima Sadewa dkk. 2020. *Statistik Deskriptif*. Tangerang: Unpam Press.
- Kurniawan, Agung Widhi dan Zarah Puspitaningtyas. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Kurniawan, Yani. 2019. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Semarang: Semarang.

Lembaga Administrasi Negara & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LAN & BPKP). 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Miftahuddin. 2018. Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa (Studi Kasus Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Indonesia: Sleman.

Panitia Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Panitia Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Puteri, Nurul Farhana. 2020. Analisis transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Skripsi. Tidak Diterbitkan. UIN Suska Riau: Riau.

Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Sarjono, Jhoin. 2021. Pengaruh good governance terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Studi pada Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V Wiratna. 2019. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: READ.

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wahyu. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la*

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.

Waris, Irwan. “Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 3, Nomor 1, (Maret 2012), hlm. 1-55

Wayan, Rustiarini Ni. “Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. (April, 2017): 1-14.

Wibowo, Rino Pandhu. 2018. *Pengaruh penerapan good governance dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Banjararum)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta: Yogyakarta.

Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian : Populer dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Press.

Yuliansyah dan Rusmianto. 2015. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arisatur Rohma

NIM : E20183094

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 30 Mei 2022

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Saya yang menyatakan

J E M B



Arisatur Rohma

NIM: E20183094

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Pengaruh Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Pemerintah Desa Rowotengah	<i>Good Governance</i> Pengelolaan APBDesa	a. Akuntabilitas b. Transparansi c. Partisipasi a. Ekonomi b. Efektivitas c. Efisiensi	1. Kuesioner 2. Wawancara	1. Pendekatan penelitian kuantitatif 2. Analisis data uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas) 3. Menggunakan analisis regresi linier berganda 4. Uji hipotesis: Uji t, Uji F, Uji <i>Adjusted R Square</i> , dan Uji R.	1. Bagaimana pengaruh penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDesa pada Pemerintah Desa Rowotengah? 2. Bagaimana pengaruh penerapan transparansi terhadap pengelolaan APBDesa pada Pemerintah Desa Rowotengah? 3. Bagaimana pengaruh penerapan partisipasi terhadap pengelolaan APBDesa pada Pemerintah Desa Rowotengah?

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) PADA PEMERINTAH DESA ROWOTENGAH

A. Identitas Responden

- Nama :
- Jenis Kelamin** : L / P
- Usia :tahun
- Pendidikan Terakhir** : SD / SMP / SMA / DIPLOMA /
SARJANA
- Jabatan Sekarang :
- Lama Masa Bekerja : < 5 tahun/ 5-15 tahun/ 15-25 tahun/ > 25
tahun
- (** lingkari salah satu pilihan jawaban)

B. Petunjuk Pengisian

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dimohon memberikan tanda *checklist* () pada pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Diharapkan hanya ada satu jawaban pada setiap pernyataan. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan mendapatkan skor, dimana skor tersebut mewakili tingkat kesesuaian pernyataan yang tersedia dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/Saudari

SS : Sangat Setuju (Skor 5)

S : Setuju (Skor 4)

RR : Ragu-Ragu (Skor 3)

TS : Tidak Setuju (Skor 2)

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)

Variabel Akuntabilitas (X1)

No	Daftar pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Pemerintah desa menetapkan rincian fungsi, tugas serta wewenang dan tanggungjawab masing-masing aparat yang selaras dengan tujuan pemerintah desa.					
2.	Dalam pelaksanaan pemerintahan, Aparatur Pemerintah Desa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku.					
3.	Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya terkait proses pengelolaan APBDesa., setiap aparat pemerintah desa melaksanakan tugasnya secara jujur.					
4.	Kekayaan milik desa dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada kekuasaan yang lebih tinggi dan juga kepada masyarakat/publik.					
5.	Pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDesa dilaksanakan secara periodik melalui laporan keuangan dan disampaikan secara tepat waktu.					
Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah						

Variabel Transparansi (X2)

No	Daftar Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Alokasi penggunaan keuangan desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan APBDesa.					
2.	Para pemangku kepentingan dapat memperoleh data dan informasi tentang pengelolaan keuangan desa dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan serta cara yang sederhana.					
3.	Dalam penyusunan APBDesa segala proses dan tahapan penyusunan dilakukan					

	secara tertib, aman dan terbuka.					
4.	Pemerintah Desa menginformasikan pelaksanaan pemerintahan desa secara tertulis dan dipublikasikan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.					
5.	Pemerintah desa menginformasikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.					
Sumber: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik						

Variabel Partisipasi (X3)

No	Daftar Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Pemerintah desa memfasilitasi forum perangkat desa yang membahas prioritas program dan kegiatan sebagai upaya penyempurnaan rancangan rencana kerja yang berhubungan dengan pengelolaan APBDesa.					
2.	Terdapat sistem pengaduan masyarakat yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa.					
3.	Penyusunan APBDesa didasarkan pada program atau kegiatan yang berjalan pada periode sebelumnya dengan mempertimbangkan usulan dari masyarakat					
4.	Masyarakat ikut berperan aktif dalam proses penyusunan APBDesa mulai dari memberikan usulan, pendapat, kritik dan saran.					
5.	Masyarakat desa memberikan penilaian terhadap realisasi pelaksanaan APBDesa					
Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa						

Variabel Pengelolaan APBDesa (Y)

No	Daftar Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
	<u>Ekonomi</u>	1	2	3	4	5
1.	Alokasi jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan batasan tertinggi dalam melakukan pengeluaran untuk belanja desa.					
2.	Terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dalam jumlah normal yang dihasilkan dari selisih antara pendapatan dengan belanja, penghematan belanja, maupun sisa dana kegiatan lanjutan.					
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa						
	<u>Efektivitas</u>	1	2	3	4	5
3.	Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (tidak kurang dari 70% jumlah anggaran belanja).					
4.	Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas dalam penggunaan keuangan desa.					
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/MK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa						
	<u>Efisiensi</u>	1	2	3	4	5
5.	Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan seluruh Aparatur Pemerintah Desa, kegiatan operasional Pemerintah Desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (tidak lebih dari 30% jumlah anggaran belanja).					
Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa						

Tabel Deskriptif Data Responden

No Responden	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Masa Kerja
1	Laki-Laki	54	SMA	5 – 15 Tahun
2	Laki-Laki	53	SMA	5 – 15 Tahun
3	Laki-Laki	56	SMA	5 – 15 Tahun
4	Laki-Laki	55	SMA	5 – 15 Tahun
5	Laki-Laki	58	SMA	5 – 15 Tahun
6	Perempuan	43	SMA	5 – 15 Tahun
7	Laki-Laki	42	SMA	5 – 15 Tahun
8	Laki-Laki	47	SMA	5 – 15 Tahun
9	Laki-Laki	48	SMA	5 – 15 Tahun
10	Laki-Laki	43	SMA	5 – 15 Tahun
11	Laki-Laki	47	SMA	5 – 15 Tahun
12	Perempuan	23	SMA	< 5 Tahun
13	Perempuan	25	SARJANA	< 5 Tahun
14	Laki-Laki	48	SMA	< 5 Tahun
15	Laki-Laki	46	SARJANA	5 – 15 Tahun
16	Laki-Laki	41	SMA	< 5 Tahun
17	Perempuan	54	SARJANA	< 5 Tahun
18	Perempuan	54	SARJANA	< 5 Tahun
19	Laki-Laki	31	SMA	< 5 Tahun
20	Perempuan	49	SMA	< 5 Tahun
21	Laki-Laki	36	SARJANA	< 5 Tahun
22	Laki-Laki	55	SARJANA	< 5 Tahun
23	Laki-Laki	35	SARJANA	< 5 Tahun
24	Laki-Laki	40	SMA	< 5 Tahun
25	Laki-Laki	57	SMA	5 – 15 Tahun
26	Laki-Laki	61	SD	5 – 15 Tahun
27	Laki-Laki	64	SARJANA	5 – 15 Tahun
28	Laki-Laki	62	SARJANA	5 – 15 Tahun
29	Laki-Laki	63	SMP	5 – 15 Tahun
30	Laki-Laki	50	SMP	5 – 15 Tahun
31	Laki-Laki	53	SD	5 – 15 Tahun
32	Laki-Laki	61	SD	5 – 15 Tahun
33	Laki-Laki	53	SMA	< 5 Tahun
34	Laki-Laki	59	SD	< 5 Tahun
35	Laki-Laki	57	SARJANA	5 – 15 Tahun
36	Laki-Laki	54	SD	5 – 15 Tahun
37	Laki-Laki	41	SMA	5 – 15 Tahun
38	Laki-Laki	56	SD	5 – 15 Tahun
39	Laki-Laki	40	SARJANA	< 5 Tahun
40	Laki-Laki	57	SMA	5 – 15 Tahun

Sumber: data primer diolah

Tabel Data Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas							Transparansi						
No.	1	2	3	4	5	Jml	No.	1	2	3	4	5	Jml
1	5	5	5	5	5	25	1	4	4	4	4	4	20
2	5	5	5	5	5	25	2	4	4	5	4	4	21
3	5	5	5	5	5	25	3	5	4	4	4	4	21
4	5	5	5	5	5	25	4	4	4	5	4	4	21
5	5	5	5	5	5	25	5	4	4	4	4	4	20
6	5	4	5	5	5	24	6	4	4	5	4	4	21
7	4	5	5	5	5	24	7	4	4	5	4	4	21
8	4	5	5	5	5	24	8	4	4	4	4	4	20
9	5	5	5	5	4	24	9	5	4	4	4	4	21
10	4	5	5	5	5	24	10	4	4	4	4	4	20
11	5	4	5	4	5	23	11	4	4	4	4	4	20
12	5	5	4	4	5	23	12	5	4	5	5	5	24
13	4	5	5	4	5	23	13	5	4	5	4	4	22
14	4	4	5	5	5	23	14	5	5	5	4	4	23
15	5	4	5	4	5	23	15	5	5	5	5	5	25
16	4	5	4	4	5	22	16	5	4	4	4	4	21
17	5	4	5	4	4	22	17	5	5	5	5	5	25
18	4	5	4	5	4	22	18	5	5	5	4	4	23
19	4	4	5	4	5	22	19	5	4	4	4	4	21
20	4	5	4	5	4	22	20	5	4	4	4	4	21
21	4	5	4	4	4	21	21	5	5	5	5	5	25
22	5	4	4	4	4	21	22	5	5	5	5	5	25
23	4	4	5	4	4	21	23	5	4	4	4	4	21
24	4	4	4	4	5	21	24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	5	21	25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20	26	5	4	4	4	4	21
27	4	4	4	4	4	20	27	5	5	5	5	5	25
28	4	4	4	4	4	20	28	5	4	4	4	4	21
29	4	4	4	4	4	20	29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20	30	5	4	4	4	4	21
31	5	5	5	5	5	25	31	5	4	4	4	4	21
32	5	5	5	5	5	25	32	4	4	4	4	4	20
33	5	5	5	5	5	25	33	5	4	5	4	4	22
34	5	5	5	5	5	25	34	5	5	5	5	5	25
35	5	5	5	5	5	25	35	5	5	5	5	5	25

36	4	5	5	5	5	24	36	5	4	4	4	4	21
37	5	5	4	5	5	24	37	5	4	5	4	4	22
38	5	5	5	5	4	24	38	4	4	4	4	4	20
39	4	5	5	5	5	24	39	5	5	5	4	4	23
40	5	5	5	4	5	24	40	4	4	4	4	4	20

Sumber: data primer diolah

Tabel Data Jawaban Responden Variabel Partisipasi dan Pengelolaan APBDesa

Partisipasi							Pengelolaan APBDesa						
No.	1	2	3	4	5	Jml	No.	1	2	3	4	5	Jml
1	4	5	4	4	4	21	1	4	4	4	4	5	21
2	4	4	4	4	5	21	2	4	4	5	4	5	22
3	5	4	4	4	4	21	3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	4	5	21
5	4	4	5	4	4	21	5	4	4	4	4	4	20
6	4	5	4	4	4	21	6	4	4	4	4	5	21
7	4	5	4	4	4	21	7	4	4	4	4	4	20
8	4	4	4	4	5	21	8	4	4	4	4	5	21
9	5	4	4	4	5	22	9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	5	21	10	4	4	4	4	5	21
11	4	4	5	5	4	22	11	4	4	4	4	4	20
12	5	5	5	5	5	25	12	5	5	4	4	5	23
13	4	5	4	5	4	22	13	4	4	4	4	4	20
14	4	4	5	5	4	22	14	4	4	4	4	5	21
15	5	5	5	5	5	25	15	5	5	5	5	5	25
16	4	4	4	5	5	22	16	4	4	4	4	5	21
17	5	5	5	5	5	25	17	5	5	5	5	5	25
18	5	4	5	5	4	23	18	4	4	4	4	4	20
19	4	5	5	4	5	23	19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	5	5	4	22	20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	5	5	4	22	21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25	22	5	5	5	5	4	24
23	4	4	5	5	4	22	23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	5	5	4	22	24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	5	5	22	25	4	4	4	4	5	21

26	4	4	5	5	4	22	26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	5	5	5	25	27	5	5	5	5	4	24
28	4	4	5	5	4	22	28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	5	5	22	29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	5	5	4	22	30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	5	21	31	4	4	4	4	4	20
32	4	4	5	4	4	21	32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	5	5	5	23	33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	5	21	34	4	4	4	4	4	20
35	4	5	4	4	4	21	35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	5	4	21	36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	5	4	21	37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	4	4	5	21	38	4	4	4	4	4	20
39	4	5	4	4	4	21	39	4	4	4	4	5	21
40	4	4	4	4	5	21	40	4	4	4	4	5	21

Sumber: data primer diolah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

Correlations							
		X1	X2	X3	X4	X5	Akuntabilitas
X1	Pearson Correlation	1	,258	.419**	,302	,267	.635**
	Sig. (2-tailed)		,108	,007	,059	,096	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X2	Pearson Correlation	,258	1	,298	.649**	.345*	.716**
	Sig. (2-tailed)	,108		,062	,000	,029	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X3	Pearson Correlation	.419**	,298	1	.495**	.498**	.757**
	Sig. (2-tailed)	,007	,062		,001	,001	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X4	Pearson Correlation	,302	.649**	.495**	1	.338*	.783**
	Sig. (2-tailed)	,059	,000	,001		,033	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X5	Pearson Correlation	,267	.345*	.498**	.338*	1	.678**
	Sig. (2-tailed)	,096	,029	,001	,033		,000
	N	40	40	40	40	40	40
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.635**	.716**	.757**	.783**	.678**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	40	40	40	40	40	40

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi

Correlations							
		X1	X2	X3	X4	X5	Transparansi
X1	Pearson Correlation	1	,271	,081	,349 [*]	,175	,407 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		,091	,620	,027	,279	,009
	N	40	40	40	40	40	40
X2	Pearson Correlation	,271	1	-,003	,061	,199	,464 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,091		,988	,707	,218	,003
	N	40	40	40	40	40	40
X3	Pearson Correlation	,081	-,003	1	-,143	-,025	,370 [*]
	Sig. (2-tailed)	,620	,988		,378	,877	,019
	N	40	40	40	40	40	40
X4	Pearson Correlation	,349 [*]	,061	-,143	1	,160	,365 [*]
	Sig. (2-tailed)	,027	,707	,378		,324	,020
	N	40	40	40	40	40	40
X5	Pearson Correlation	,175	,199	-,025	,160	1	,456 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,279	,218	,877	,324		,003
	N	40	40	40	40	40	40
Transparansi	Pearson Correlation	,407 ^{**}	,464 ^{**}	,370 [*]	,365 [*]	,456 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	,009	,003	,019	,020	,003	
	N	40	40	40	40	40	40

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi

Correlations							
		X1	X2	X3	X4	X5	Partisipasi
X1	Pearson Correlation	1	.355*	.250	.201	.302	.730**
	Sig. (2-tailed)		.025	.120	.214	.059	.000
	N	40	40	40	40	40	40
X2	Pearson Correlation	.355*	1	0,000	-,066	.066	.467**
	Sig. (2-tailed)	.025		1,000	.687	.687	.002
	N	40	40	40	40	40	40
X3	Pearson Correlation	.250	0,000	1	.503**	-,201	.584**
	Sig. (2-tailed)	.120	1,000		.001	.214	.000
	N	40	40	40	40	40	40
X4	Pearson Correlation	.201	-,066	.503**	1	-,091	.587**
	Sig. (2-tailed)	.214	.687	.001		.577	.000
	N	40	40	40	40	40	40
X5	Pearson Correlation	.302	.066	-,201	-,091	1	.391*
	Sig. (2-tailed)	.059	.687	.214	.577		.013
	N	40	40	40	40	40	40
Partisipasi	Pearson Correlation	.730**	.467**	.584**	.587**	.391*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.013	
	N	40	40	40	40	40	40

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan APBDesa

Correlations							
		X1	X2	X3	X4	X5	Pengelolaan_APBDesa
X1	Pearson Correlation	1	1.000**	.771**	.882**	,198	.829**
	Sig. (2-tailed)		0,000	,000	,000	,220	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X2	Pearson Correlation	1.000**	1	.771**	.882**	,198	.829**
	Sig. (2-tailed)	0,000		,000	,000	,220	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X3	Pearson Correlation	.771**	.771**	1	.882**	,198	.778**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,220	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X4	Pearson Correlation	.882**	.882**	.882**	1	,105	.798**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,520	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X5	Pearson Correlation	,198	,198	,198	,105	1	.520**
	Sig. (2-tailed)	,220	,220	,220	,520		,001
	N	40	40	40	40	40	40
Pengelolaan_APBDesa	Pearson Correlation	.829**	.829**	.778**	.798**	.520**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	
	N	40	40	40	40	40	40

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	40	100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,759	5

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Hasil Reliabilitas Variabel Transparansi

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	40	100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,857	5

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	40	100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,712	5

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengelolaan APBDesa

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	40	100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,835	5

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Deskriptif Data Statistik Variabel

Statistics					
		Akuntabilitas	Transparansi	Partisipasi	Pengelolaan_APBDesa
N	Valid	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0
Mean		23,00	22,85	22,00	20,95
Median		23,50	23,00	22,00	20,00
Std. Deviation		1,754	1,075	1,301	1,501
Variance		3,077	1,156	1,692	2,254
Range		5	5	4	5
Minimum		20	20	21	20
Maximum		25	25	25	25

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Deskriptif Data Statistik Variabel Akuntabilitas

Akuntabilitas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20	5	12,5	12,5	12,5
	21	5	12,5	12,5	25,0
	22	5	12,5	12,5	37,5
	23	5	12,5	12,5	50,0
	24	10	25,0	25,0	75,0
	25	10	25,0	25,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Deskriptif Data Statistik Variabel Transparansi

Transparansi					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20	2	5,0	5,0	5,0
	22	11	27,5	27,5	32,5
	23	19	47,5	47,5	80,0
	24	5	12,5	12,5	92,5
	25	3	7,5	7,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Deskriptif Data Statistik Variabel Partisipasi

Partisipasi					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21	18	45,0	45,0	45,0
	22	14	35,0	35,0	80,0
	23	3	7,5	7,5	87,5
	25	5	12,5	12,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Deskriptif Data Statistik Variabel Pengelolaan APBDesa

Pengelolaan_APBDesa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20	23	57,5	57,5	57,5
	21	9	22,5	22,5	80,0
	22	2	5,0	5,0	85,0
	23	1	2,5	2,5	87,5
	24	3	7,5	7,5	95,0
	25	2	5,0	5,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas

1. Membuat tabel distribusi frekuensi
 - a. Jangkauan data = (data terbesar – data terkecil) + 1
 Jangkauan data = $(25 - 20) + 1 = 6$
 - b. Kelas interval = $1 + 3,3 \log 40$
 Kelas interval = $1 + 5,286 = 6,286$ (dibulatkan menjadi 6)
 - c. Panjang kelas = jangkauan data / jumlah kelas
 Panjang kelas = $6 / 6 = 1$

Kelas Interval	Frekuensi
20	5
21	5
22	5
23	5
24	10
25	10
Jumlah	40

Sumber: data primer diolah

2. Mengelompokkan nilai variabel
 - a. Nilai minimum = $5 \times 1 = 5$
 - b. Nilai maksimum = $5 \times 5 = 25$
 - c. Mean Ideal (M_i) = $\frac{1}{2}$ (nilai maksimum + nilai minimum)
 Mean Ideal (M_i) = $\frac{1}{2} (25+5) = 15$
 - d. Standar Deviasi Ideal (S_i) = $\frac{1}{6}$ (nilai maksimum – nilai minimum)
 Standar Deviasi Ideal (S_i) = $\frac{1}{6} (25 - 5) = 3,3$

3. Menentukan kategori variabel

- a. Sangat Baik

$$M_i + 1,5S_i < X < M_i + 3S_i$$

$$15 + 1,5(3,3) < X < 15 + 3(3,3)$$

$$20 < X < 25$$
- b. Baik

$$M_i + 0,5S_i < X < M_i + 1,5S_i$$

$$15 + 0,5(3,3) < X < 15 + 1,5(3,3)$$

$$16 < X < 20$$
- c. Sedang

$$M_i - 0,5S_i < X < M_i + 0,5S_i$$

$$15 - 0,5(3,3) < X < 15 + 0,5(3,3)$$

- 14 < X 16
- d. Buruk $Mi - 1,5Si < X$ $Mi - 0,5Si$
 $15 - 1,5(3,3) < X$ $15 - 0,5(3,3)$
 $10 < X$ 14
- e. Sangat Buruk $Mi - 3Si < X$ $Mi - 1,5Si$
 $15 - 3(3,3) < X$ $15 - 1,5(3,3)$
 $5 < X$ 10

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	20 < X 25	35	87,5%	Sangat Baik
2	16 < X 20	5	12,5%	Baik
3	14 < X 16	-	-	Sedang
4	10 < X 14	-	-	Buruk
5	5 < X 10	-	-	Sangat Buruk

Sumber: data primer diolah

Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Transparansi

1. Membuat tabel distribusi frekuensi
 - a. Jangkauan data = (data terbesar – data terkecil) + 1
 Jangkauan data = (25 – 20) + 1 = 6
 - b. Kelas interval = $1 + 3,3 \log 40$
 Kelas interval = $1 + 5,286 = 6,286$ (dibulatkan menjadi 6)
 - c. Panjang kelas = jangkauan data / jumlah kelas
 Panjang kelas = $6 / 6 = 1$

Kelas Interval	Frekuensi
20	11
21	15
22	3
23	3
24	1
25	7
Jumlah	40

Sumber: data primer diolah

2. Mengelompokkan nilai variabel
 - a. Nilai minimum = $5 \times 1 = 5$
 - b. Nilai maksimum = $5 \times 5 = 25$

- c. Mean Ideal (M_i) = $\frac{1}{2}$ (nilai maksimum + nilai minimum)
Mean Ideal (M_i) = $\frac{1}{2}$ (25+5) = 15
- d. Standar Deviasi Ideal (S_i) = $\frac{1}{6}$ (nilai maksimum – nilai minimum)
Standar Deviasi Ideal (S_i) = $\frac{1}{6}$ (25 – 5) = 3,3

3. Menentukan kategori variabel

- a. Sangat Baik $M_i + 1,5S_i < X < M_i + 3S_i$
 $15 + 1,5(3,3) < X < 15 + 3(3,3)$
 $20 < X < 25$
- b. Baik $M_i + 0,5S_i < X < M_i + 1,5S_i$
 $15 + 0,5(3,3) < X < 15 + 1,5(3,3)$
 $16 < X < 20$
- c. Sedang $M_i - 0,5S_i < X < M_i + 0,5S_i$
 $15 - 0,5(3,3) < X < 15 + 0,5(3,3)$
 $14 < X < 16$
- d. Buruk $M_i - 1,5S_i < X < M_i - 0,5S_i$
 $15 - 1,5(3,3) < X < 15 - 0,5(3,3)$
 $10 < X < 14$
- e. Sangat Buruk $M_i - 3S_i < X < M_i - 1,5S_i$
 $15 - 3(3,3) < X < 15 - 1,5(3,3)$
 $5 < X < 10$

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	20 < X < 25	29	72,5%	Sangat Baik
2	16 < X < 20	11	27,5%	Baik
3	14 < X < 16	-	-	Sedang
4	10 < X < 14	-	-	Buruk
5	5 < X < 10	-	-	Sangat Buruk

Sumber: data primer diolah

Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi

1. Membuat tabel distribusi frekuensi
- a. Jangkauan data = (data terbesar – data terkecil) + 1
Jangkauan data = (25 – 21) + 1 = 5
- b. Kelas interval = $1 + 3,3 \log 40$

Kelas interval = $1 + 5,286 = 6,286$ (dibulatkan menjadi 6)

c. Panjang kelas = jangkauan data / jumlah kelas

Panjang kelas = $5 / 6 = 0,833$ (dibulatkan menjadi 1)

Kelas Interval	Frekuensi
16	0
17	18
18	14
19	3
20	0
21	5
Jumlah	40

Sumber: data primer diolah

2. Mengelompokkan nilai variabel

a. Nilai minimum = $5 \times 1 = 5$

b. Nilai maksimum = $5 \times 5 = 25$

c. Mean Ideal (M_i) = $\frac{1}{2}$ (nilai maksimum + nilai minimum)

Mean Ideal (M_i) = $\frac{1}{2} (25+5) = 15$

d. Standar Deviasi Ideal (S_i) = $\frac{1}{6}$ (nilai maksimum – nilai minimum)

Standar Deviasi Ideal (S_i) = $\frac{1}{6} (25 - 5) = 3,3$

3. Menentukan kategori variabel

a. Sangat Baik $M_i + 1,5S_i < X < M_i + 3S_i$

$15 + 1,5(3,3) < X < 15 + 3(3,3)$

$20 < X < 25$

b. Baik $M_i + 0,5S_i < X < M_i + 1,5S_i$

$15 + 0,5(3,3) < X < 15 + 1,5(3,3)$

$16 < X < 20$

c. Sedang $M_i - 0,5S_i < X < M_i + 0,5S_i$

$15 - 0,5(3,3) < X < 15 + 0,5(3,3)$

$14 < X < 16$

d. Buruk $M_i - 1,5S_i < X < M_i - 0,5S_i$

$$15 - 1,5(3,3) < X \quad 15 - 0,5(3,3)$$

$$10 < X \quad 14$$

e. Sangat Buruk

$$M_i - 3S_i < X \quad M_i - 1,5S_i$$

$$15 - 3(3,3) < X \quad 15 - 1,5(3,3)$$

$$5 < X \quad 10$$

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	16 < X 20	40	100%	Sangat Baik
2	13 < X 16	-	-	Baik
3	11 < X 13	-	-	Sedang
4	8 < X 11	-	-	Buruk
5	4 < X 8	-	-	Sangat Buruk

Sumber: data primer diolah

Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Pengelolaan APBDesa

1. Membuat tabel distribusi frekuensi

a. Jangkauan data = (data terbesar – data terkecil) + 1

$$\text{Jangkauan data} = (25 - 20) + 1 = 6$$

b. Kelas interval = $1 + 3,3 \log 40$

$$\text{Kelas interval} = 1 + 5,286 = 6,286 \text{ (dibulatkan menjadi 6)}$$

c. Panjang kelas = jangkauan data / jumlah kelas

$$\text{Panjang kelas} = 6 / 6 = 1$$

Kelas Interval	Frekuensi
16	24
17	10
18	1
19	1
20	2
21	2
Jumlah	40

Sumber: data primer diolah

2. Mengelompokkan nilai variabel

a. Nilai minimum = $5 \times 1 = 5$

b. Nilai maksimum = $5 \times 5 = 25$

c. Mean Ideal (M_i) = $\frac{1}{2}$ (nilai maksimum + nilai minimum)

$$\text{Mean Ideal } (M_i) = \frac{1}{2} (25+5) = 15$$

d. Standar Deviasi Ideal (S_i) = $\frac{1}{6}$ (nilai maksimum – nilai minimum)

$$\text{Standar Deviasi Ideal } (S_i) = \frac{1}{6} (25 - 5) = 3,3$$

3. Menentukan kategori variabel

a. Sangat Baik

$$M_i + 1,5S_i < X \quad M_i + 3S_i$$

$$15 + 1,5(3,3) < X \quad 15 + 3(3,3)$$

$$20 < X \quad 25$$

b. Baik

$$M_i + 0,5S_i < X \quad M_i + 1,5S_i$$

$$15 + 0,5(3,3) < X \quad 15 + 1,5(3,3)$$

$$16 < X \quad 20$$

c. Sedang

$$M_i - 0,5S_i < X \quad M_i + 0,5S_i$$

$$15 - 0,5(3,3) < X \quad 15 + 0,5(3,3)$$

$$14 < X \quad 16$$

d. Buruk

$$M_i - 1,5S_i < X \quad M_i - 0,5S_i$$

$$15 - 1,5(3,3) < X \quad 15 - 0,5(3,3)$$

$$10 < X \quad 14$$

e. Sangat Buruk

$$M_i - 3S_i < X \quad M_i - 1,5S_i$$

$$15 - 3(3,3) < X \quad 15 - 1,5(3,3)$$

$$5 < X \quad 10$$

No.	Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	$16 < X \leq 20$	16	40%	Sangat Baik
2	$13 < X \leq 16$	24	60%	Baik
3	$11 < X \leq 13$	-	-	Sedang
4	$8 < X \leq 11$	-	-	Buruk
5	$4 < X \leq 8$	-	-	Sangat Buruk

Sumber: data primer diolah

Tabel Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,84659745
Most Extreme Differences	Absolute	,113
	Positive	,112
	Negative	-,113
Test Statistic		,113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-16,097	4,974		-3,236	,003		
	Akuntabilitas	,203	,094	,238	2,165	,037	,733	1,363
	Transparansi	,518	,132	,371	3,915	,000	,985	1,015
	Partisipasi	,934	,126	,809	7,405	,000	,740	1,352

a. Dependent Variable: Pengelolaan_APBDesa

Collinearity Diagnostics ^a							
Model		Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Akuntabilitas	Transparansi	Partisipasi
1	1	3,991	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,007	24,184	,00	,36	,00	,15
	3	,002	45,772	,00	,23	,76	,28
	4	,001	82,694	1,00	,41	,24	,57

a. Dependent Variable: Pengelolaan_APBDesa

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4,959	3,306		-1,500	,142
	Akuntabilitas	,079	,062	,235	1,258	,216
	Transparansi	,076	,088	,140	,866	,392
	Partisipasi	,092	,084	,204	1,095	,281

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)

Tabel Hasil Uji Hipotesis

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.826 ^a	,682	,655	,881

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59,948	3	19,983	25,736	.000 ^b
	Residual	27,952	36	,776		
	Total	87,900	39			

a. Dependent Variable: Pengelolaan_APBDesa
b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-16,097	4,974		-3,236	,003
	Akuntabilitas	,203	,094	,238	2,165	,037
	Transparansi	,518	,132	,371	3,915	,000
	Partisipasi	,934	,126	,809	7,405	,000

a. Dependent Variable: Pengelolaan_APBDesa

Sumber: data primer diolah (Output SPSS)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur; Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: feb@uinkhas.ac.id Website: <https://feb.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-109 /Un.22/7.a/PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

01 Maret 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Rowotengah
Jl. Sultan Agung No. 123, Rowotengah

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama	: Arisatur Rohma
NIM	: E20183094
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Ekonomi Islam
Prodi	: Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan APBDesa di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan
Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERBARU
DESA ROWO TENGAH
Jl. Sultan Agung No.123 Telp. 0336 7719195

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 131 /35.09.21.2008/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: ARISATUR ROHMA
NIM	: E20183094
Semester	: VIII (Delapan)
Prodi	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat	: Dusun Gondosari RT 003 RW 009, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
No. HP	: 085730578248
Judul Skripsi	: Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Pemerintah Desa Rowotengah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Bahwa mahasiswa atas nama tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian skripsi di Kantor Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

Surat Keterangan ini dipergunakan untuk persyaratan kelengkapan penyelesaian skripsi Strata I di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana perlunya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Jember, 11 Maret 2022

Kepala Desa Rowotengah



DEBIK SUHADI

JURNAL PENELITIAN

Lokasi Penelitian: Kantor Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

No	Tanggal	Kegiatan Penelitian	Paraf
1.	Kamis, 04 November 2021	Wawancara tentang APBDesa dengan Sekretaris Desa Rowotengah.	
2.	Jumat, 05 November 2021	Menyerahkan surat izin penelitian.	
3.	Senin, 14 Februari 2022	Meminta data tentang struktur organisasi Pemerintah Desa Rowotengah.	
4.	Senin, 21 Februari 2022	Wawancara dan meminta data terkait gambaran objek penelitian.	
5.	Rabu, 09 Maret 2022	Menyebarkan kuesioner kepada seluruh Aparatur Pemerintah Desa Rowotengah	
6.	Kamis, 10 Maret 2022	Menyebarkan kuesioner kepada anggota BPD.	
7.	Jumat, 11 Maret 2022	Permohonan surat selesai penelitian.	

Jember, 11 Maret 2022

Kepala Desa Rowotengah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan



2. Menyebarkan angket kepada ketua BPD



BIODATA PENULIS



Nama : Arisatur Rohma
NIM : E20183094
Alamat : Dusun Gondosari RT 003 RW 009 Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember
TTL : Jember, 21 Juli 1999
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK AL HIDAYAH 37 : 2004-2006
2. SDN Rowotengah 04 : 2006-2012
3. MTsN 8 Jember : 2012-2015
4. SMAN 2 Tanggul : 2015-2018
5. UIN KHAS Jember : 2018-2022